

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SITI PAISAH  
NIM. 51153102**

**PROGRAM STUDI**

**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALUARAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI  
KECAMATAN LINGGA BAYU MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Ekonomi Islam**

**Oleh :**

**SITI PAISAH  
NIM. 51153102**

**PROGRAM STUDI  
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LINGGA BAYU**

Oleh:

Siti Paisah

Nim. 51153102

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 19 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Sudiarti, MA  
NIP. 195911121990032002

Tri Inda Fadhilah Rahma, M.E.I  
NIP. 199101292015032008

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag  
NIP.197601262003122003

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL” an. Siti Paisah, NIM 51153102 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 16 Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 16 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, Nst, M.A  
NIP. 19790701 200901 2 003

Kusmilawaty, SE, AK, M. Ak  
NIP. 19800614 201503 2 001

Anggota

1. Tuti Anggraini, M.A  
NIP. 19770531 200501

2. Tri Inda Fadhila Rahma M.E.I  
NIP. 19910129 201503 2 008

3. Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, Nst, M.A  
NIP. 19790701 200901 2 003

4. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA  
NIP. 19890426 201903 1 007

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 19760507 200604 1 002

## ABSTRAK

**Siti Paisah, 51153102. Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/seseorang miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Kemiskinan yang masih Fluktuatif dalam hal ini bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan konsumsi keluarga. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak masyarakat miskin di Kecamatan Lingga Bayu, sebab adanya ketidaktepatan penyaluran PKH bagi masyarakat miskin. Adapun rumusan masalah: Bagaimana efektivitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu dan Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan efektivitas dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan penelitian Mixed Methods dengan pendekatan metode campuran antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dan teknik pengumpulan data wawancara, penyebaran kuisioner/angket dan dokumentasi. Dalam menentukan sample dan populasi menggunakan metode sampling purposive, kemudian untuk menetapkan besarnya sampel menggunakan rumus slovin yakni dari 980 peserta PKH, yang menjadi populasi, diambil 91 peserta PKH untuk dijadikan sample. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu kurang terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini karena masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan/penetapan peserta PKH, selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH tidak sesuai dengan tujuan program PKH serta ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping PKH dan Peserta PKH antara lain: banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH, belum adanya kesadaran dari peserta, dan pencairan bantuan PKH yang sering tidak tepat waktu.

***Kata Kunci : Efektivitas, PKH, Kemiskinan***

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya dapat merampungkan skripsi ini. Serta tidak lupa pula, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada jujungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau yang menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia sebagai ajaran Rahmat al lailamin. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah: **Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, semangat, dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang teristimewa orang tua penulis, **Ayahanda tercinta Nasrin**, dan **Ibunda tercinta Asnah Batubara** juga seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, nasehat, dorongan semangat, bantuan baik berupa moril maupun materil untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas diperkuliahan sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Selain itu, dalam penyelesaian ini juga banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. **Bapak Dr. Andri Soemitra, MA.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
3. **Ibu Dr. Marliyah MA.** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus pembimbing akademik saya.

4. **Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA.** selaku Pembimbing Skripsi I dan **Ibu Tri Inda Fadhilah Rahma, M.E.I.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
5. Seluruh staf pengajar dan dan pegawai lingkungan Jurusan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
6. Keluarga besar Tercinta, yang selalu memotivasi (Ayah & bunda, abang, kakak, serta adik terima kasih atas dukungannya).
7. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Islam – C stambuk 2015 (terkhusus buat **Ahmad Zulfikar SE**, Squad Wardah: **Riadh Lubis SE, Ratna Sari SE, Hamidah SE, Endang Siregar SE, Devi Malinda SE**, serta **Indra Kurniawan SE** dan **Ahmad Saputra SE**) yang setia mengukir cerita selama masa perkuliahan dan telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman KKN 46 (terkhusus, **Aisyah Putri Spd, Janis Ahmad Spd, Daylina Sandi Spd, Meutia Spd, Wahidah Spd, Ade Soraya Spd** ).
9. Dan tak lupa kakak kos tercinta **Erni Siregar, Spd** dan Kakak **Ummi Kalsum, Spd** dan juga kak **Wiyah lubis Spd**. Yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada peneliti dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah kalian berikan dibaloh oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi dapat lebih baik lagi dan memberikan ilmu yang bermanfaat.

Medan, 19 Juli 2019

Siti Paisah  
NIM. 51153102

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Penelitian .....	8

### BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Efektivitas Penyaluran PKH .....	10
B. Program Keluarga Harapan .....	13
C. Kemiskinan .....	20
D. Penanggulangan Kemiskinan.....	27
E. Penelitian Terdahulu.....	41

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
C. Objek Penelitian .....	44
D. Populasi dan Sampel .....	44
E. Sumber Data.....	46
F. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian .....	47
G. Teknis dan Instrumen Pengumpulan Data .....	47
H. Metode Penelitian dan Analisis Data .....	48

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Lingga Bayu.....	51
a. Letak Geografi Kecamatan .....	51
b. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan .....	52
2. Gambaran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lingga Bayu .....	55
a. Sejarah PKH di Kecamatan Lingga Bayu .....	55



b. Implementasi PKH di Kecamatan Lingga Bayu .....	57
3. Karakteristik Responden .....	59
a. Usia Responden.....	59
b. Berdasarkan Pekerjaan .....	59
c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.....	60
4. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu .....	61
<b>B. Pembahasan</b>	
1. Hasil Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.....	68
2. Analisis Hambatan dalam Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara besar dalam banyak hal. Selain memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, dan utang yang besar, Indonesia memiliki penduduk miskin yang besar pula. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini yang hampir mencapai 40 juta orang jauh melampaui keseluruhan jumlah penduduk di Selandia Baru (sekitar 4 juta orang), serta Australia dan Malaysia dengan penduduk masing-masing berjumlah sekitar 10 juta dan 24 juta jiwa.<sup>1</sup>

Kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda prioritas pembangunan Nasional sejak lama. Berbagai kebijakan, staretegi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala Nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik yang bersifat langsung (program-program perlindungan sosial) maupun yang tidak langsung (program sektoral dan daerah). Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang menjalani kehidupan secara bermatabat.

Menurut kuncoro, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan. Kemiskinan adalah kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasi sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Selain itu, ada yang berpendapat

---

<sup>1</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, ( Bandung: PT Refika Aditama 2017), h. 152.

bahwa penduduk dikategorikan miskin jika memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan.<sup>2</sup>

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam menganggap sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan ini merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama manusia lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Islam juga mengatur tentang bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti pemberian zakat, infak dan sedekah. Namun diantara ketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah infak. Dimana infak merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sebagaimana program Keluarga Harapan diberikan keluarga miskin diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat terlepas dari kemiskinan.<sup>4</sup>

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَا كِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾<sup>(٢٧٣)</sup>  
 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾<sup>(٢٧٣)</sup>

<sup>2</sup>Abdul Badith, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2012), h. 5.

<sup>3</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h 23-24.

<sup>4</sup>Munawwarah Sahib. "Pengaruh Kebijakan PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa," (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2016 ), h. 6.

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang member petunjuk kepada siapa yang Diakehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfaq melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak dizalimi (dirugikan). (apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha dibumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kayak arena menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari cirri- cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang laian. Apapun harta yang baik kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk suatu kebaikan maka, akan mendapat balasan dan tidak akan mendapat kerugian. Dan manusia dianjurkan untuk berinfaq kepada sesama khususnya kepada orang miskin yang mana mereka tidak dapat berusaha atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka tidak meminta-minta. Sehingga dapat dikatakan suatu Negara yang bertanggung jawab atas rakyatnya dalam hal ini pemerintah Dinas sosial berperan memberikan bantuan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Mengacu pada penanggulanagan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan memenuhi hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan

---

<sup>5</sup>Departemen Agama Dalam Negeri, *Alqur'an dan Terjemah*, h. 46

atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Tiap-tiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangannya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian jelas bahwa Negara, yang mengandung arti luas seluruh pelaku dan bukan hanya pemerintah pusat, terkhususnya Kecamatan Lingga Bayu mendapatkan mandat untuk turut serta menanggulangi masalah kemiskinan. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih sering dipandang sebagai urusan pemerintah saja. Uniknyanya, perpektif tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja, namun juga datang dari kalangan aparat pemerintahan sendiri. Konsekuensinya, keterlibatan masyarakat selama ini dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih kecil. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya, standar hidup disuatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal atau pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan sehingga tidak banyak memiliki banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.<sup>7</sup> Data tentang penduduk miskin di Kecamatan Lingga Bayu pada kurun waktu enam tahun terakhir ini menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dengan persentase 9,62% ditahun tahun 2015. Dan di tahun 2016 terjadi penurunan kembali persentase kemiskinan yaitu 9,28%. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yaitu dengan persentase 11,13%

Perkembangan jumlah persentase kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2012-2017 jika dilihat data dari Dinas Sosial Panyabungan pada tabel dibawah ini:

---

<sup>6</sup>Heru Nugroho, Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan, (Yogyakarta: Media Wijaya, 1995) h.51

<sup>7</sup>Criswardani Suryawati, jurnal: Memahami Kemiskinan secara Multidimensional

**Tabel 1**  
**Persentase Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu Tahun 2012-2017**

Tahun	Persentase Kemiskinan
2012	12,60 %
2013	11,98 %
2014	11,58 %
2015	9,62 %
2016	9,28 %
2017	11,13 %

*Data diolah dari sumber: Dinas Sosial Panyabungan*

Kondisi diatas pada tabel (1) dapat dilihat betapa ketidakstabilan perekonomian di Kecamatan Lingga Bayu, masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan kehadiran pemerintah Dinas Sosial Mandailing Natal. Khususnya di Kecamatan Lingga Bayu masih ada masyarakat kaya yang mendapat bantuan PKH ini. Dan sebaliknya ada sebagian masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan PKH, bahkan masih ada nama penerima PKH yang ganda.<sup>8</sup>

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketetapan sasaran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Dengan demikian, tujuan Program Bantuan Pangan Tunai adalah untuk meningkatkan ketetapan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada rakyat miskin, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran dengan demikian penyaluran bantuan pangan secara tunai berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Bahwa, PKH dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dapat meningkatkan inklusi keuangan, menurunkan

---

<sup>8</sup>Rahmad, *Operator PKH Mandailing Natal*, Wawancara Pribadi, 15 Maret 2019, pukul 10.30 WIB.

<sup>9</sup>*Pedoman Umum Bantuan Non Pangan*, 2018.

angka gizi buruk dan meningkatkan pencapaian pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/seseorang miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.<sup>10</sup> Dalam hal ini bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan konsumsi keluarga. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak masyarakat miskin di Kecamatan Lingga Bayu, sebab adanya ketidaktepatan penyaluran PKH bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti judul

**”ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu?

---

<sup>10</sup>*Pengetahuan dan Kebijakan PKH*, 2018.



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.
- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan lingga Bayu.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara teoritis**

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sumber daya manusia khususnya.
- 2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai kinerja Dinas Sosial Khususnya di Staf Jaminan Sosial di bidang sosial tentang mengurangi beban pengeluarankeluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.

#### **b. Secara praktis**

- 1) Bagi Kepala Jaminan sosial dibidang sosial, diharapkan penelitian dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan.
- 2) Bagi Penulis memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengalaman.

- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bantuan PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman penulis dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah sehingga sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istila-istilah tersebut antara lain:

##### 1. Efektivitas

Efektivitas menurut menurut Mahmudi merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>11</sup>

Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, dapat membawa hasil, berhasil guna).Efektivitas disebut juga efektif, apaabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>12</sup>

##### 2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/seseorang miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

##### 3. Kemiskinan

Menurut Sri Rahaju kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

---

<sup>11</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektor publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 9.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 250.

kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak terbatas pada bidang ekonomi.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang tidak memadai.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Sri Rahaju Djamurti Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 225-226.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Efektivitas Penyaluran PKH**

##### **1. Efektivitas**

Kata efektif dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>14</sup> Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>15</sup> Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. Sedangkan menurut beberapa ahli tentang pengertian efektivitas yaitu:

- a. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan .diantara pelaksananya.
- b. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Efektivitas menurut menurut Mahmudi merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diatas, maka dapat dipahami bahwa efektifitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu

---

<sup>14</sup>Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata baru*, ( Surabaya: Mekar, 2008), h.132.

<sup>15</sup>Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h .4.

<sup>16</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektok publik*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h.92.

program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian efektifitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektifitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektifitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Menurut Makmur pengukuran konsep terhadap efektifitas adalah keberhasilan program keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, efisiensi, pencapaian tujuan.<sup>17</sup>

## **2. Ukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan**

Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM, indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut:

### **a. Indikator masukan**

Merupakan langkah awal kesipan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya pedoman umum dan persiapan sosialisasi.

### **b. Indikator Proses**

Merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi

### **c. Indikator Keluaran**

---

<sup>17</sup>Makmur Syarif, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi/Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 87

Setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan.

d. Indikator Manfaat

Dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.

e. Indikator Dampak

Merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.<sup>18</sup>

### 3. Penyaluran PKH

Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution*, yang berarti penyaluran, sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan kamus Inggris Indonesia Jhon M. Echols dan Hassan Shadilly, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, mengageni.<sup>19</sup> Sedangkan Kamus Besar bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau jasa kepada pihak lain.

Bagi sosiolog proses yang dikatakan ekonom tersebut terjadi dalam suatu jaringan hubungan sosial internasional jadi distribusi dapat dimengerti sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melaluinya orang mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan, distribusi juga menunjukkan suatu proses alokasi dari produksi barang sampai proses konsumsi. Dengan demikian, distribusi merupakan proses yang mengantar produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya.<sup>20</sup>

Penyaluran dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata *salur* yang berarti mengalirkan, mengarahkan, meneruskan atau mendistribusikan.

---

<sup>18</sup>Ridho Diana “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perpektif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Kota Gowa Kecamatan Way Kanan*” (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018) h. 65.

<sup>19</sup>Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 93.

<sup>20</sup>Ibid, h. 95

Penyaluran sendiri dapat dipahami sebagai proses, cara, ataupun perbuatan menyalurkan. Penyaluran meliputi aspek pelaksanaan dan penatausahaan.

Penyaluran bantuan sosial PKH merupakan pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. Bantuan sosial PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, yaitu:

- a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
- b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
- c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000.<sup>21</sup>

## **B. Program Keluarga Harapan**

### **1. Pengertian Program Keluarga Harapan**

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melaksanakan program bantuan langsung tunai bersyarat yang dikenal dengan nama Program keluarga Harapan (PKH).

Didalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 1 Tahun 2018. Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfer* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Kemensos, khususnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga adalah koordinator dan pelaksana program PKH. Persyaratan tersebut tersebut dapat berupa kehadiran

---

<sup>21</sup>Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu, Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi, (Jakarta: Cetakan Kedua, November 2018), h. 99

difasilitas pendidikan (bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran difasilitas kesehatan (bagi anak balita maupun ibu hamil). Program PKH ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat Konstitusi dan Nawacita Presiden RI.<sup>22</sup>

Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, serta kesejahteraan sosial, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *millinium*. Lima komponen tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 dan masih berlanjut sampai dengan sekarang ini.

## **2. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Tujuan program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan pasal 2 yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan

---

<sup>22</sup>[www.Kemensos.pkh.go.id](http://www.Kemensos.pkh.go.id) 2017.



- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga Penerima Manfaat.<sup>23</sup>

### 3. Syarat kepesertaan PKH (Penerima Manfaat)

Keluarga Penerima manfaat (KPM) PKH adalah keluarga miskin berdasarkan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang memenuhi minimal satu kriteria sebagai berikut:<sup>24</sup>

Keluarga penerima bantuan PKH merupakan keluarga miskin yang memiliki komponen berikut ini:

**Tabel 2.1**

Komponen Kesehatan	Komponen Pendidikan	Komponen Kesejahteraan Sosial
Ibu Hamil/Nifas	SD	Disabilitas Berat
Anak Usia di bawah 6 Tahun	SMP	Lanjut Usia mulai dari 70 tahun
	SMA	

Ketiga kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar calon penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi. Perbedaan kriteria kategori akan berpengaruh pada besar bantuan PKH yang diterima. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) komponen kesehatan dan/atau komponen pendidikan saja, untuk 2017 ini

<sup>23</sup>TP2NK, Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017), h.1

<sup>24</sup>*Ibid*

besar bantuannya adalah Rp. 1.890.000 per tahun, sedangkan untuk KPM PKH yang memiliki komponen kesejahteraan sosial besar bantuan mencapai Rp. 2.000.000 per tahun, pada setiap tahun data akan selalu berubah begitupun besar bantuan PKH yang akan diterima KPM ditahun seterusnya.<sup>25</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Peserta PKH**

Hak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yakni mendapatkan bantuan uang yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program dan mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhannya serta terdaftar dan mendapatkan program-program komplementer penanggulangan kemiskinan lainnya.

Kewajiban PKH yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Bayi

Bayi berusia 0-11 bulan (dengan manfaat Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan). Dan bayi berusia 6-11 bulan (mendapat suplemen vitamin A)

b. Balita

Balita berusia 1-5 tahun (mendapat imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan setiap satu bulan), balita berusia 5-6 tahun (mendapatkan pemeriksaan berat badan setiap satu bulan dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun), serta balita berusia 6-7 tahun yang berhak menimbang berat badannya di fasilitas kesehatan (faskes)

---

<sup>25</sup> *Pengolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan*, 2017, h. 201,

c. Anak Sekolah

Anak usia sekolah 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD,SMP,SLTA), terdaftar disekolah /pendidikan kesetaraan dengan tingkat kehadiran dikelas minimal 85% (persen)

d. Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas

Yang berhak mendapat Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak empat kali dalam tiga kali trimester, berhak dibantu melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes dan berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan dua kali sebelum bayi usia satu bulan.Kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.

Sejak tahun 2016, penerima bantuan PKH diperluas dengan menambah kategori rentan, yakni keluarga miskin yang memiliki anggota berusia 70 tahu keatas berhak mendapatkan Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia) dan berhak mengikuti kegiatan sosial (*day care* dan *home care*)sedangkan Penyandang Disabilitas Berat penerima PKH berhak mendapatkan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan dan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan kerumah (*home care*).<sup>26</sup>

## 5. Besaran Bantuan

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besar bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti scenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**

No	Komponen Bantuan	Indek Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 1.200.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 1.200.000
3	Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat	Rp. 450. 000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp. 750. 000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp. 1.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 3.100.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas	Rp. 2.000.000

*Data diolah: Sumber Keputusan Dinas Sosial RI*

<sup>26</sup>Ibid, h. 203

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 600.000, bantuan maksimum per RTM Rp. 2.200.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan dengan nominal paling besar. Pembayaran bantuan dilakukan dalam 2-4 tahap dalam setahun yang dijadwalkan untuk bulan penyaluran Februari (1), Mei (2), Agustus (3), November (4).Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.

## **6. Mekanisme Pelaksanaan PKH**

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan Tahapan:

- a. Perencanaan
- b. Penetapan calon peserta PKH
- c. Validasi data calon penerima manfaat
- d. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH
- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- f. Pendampingan PKH
- g. Peningkatan Kemampuan PKH
- h. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH
- i. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH
- j. Transformasi kepesertaan PKH

## **7. Pelaksana PKH Kecamatan :**

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain
- b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain
- c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
- d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
- e. Membangun jejaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH

- f. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota<sup>27</sup>

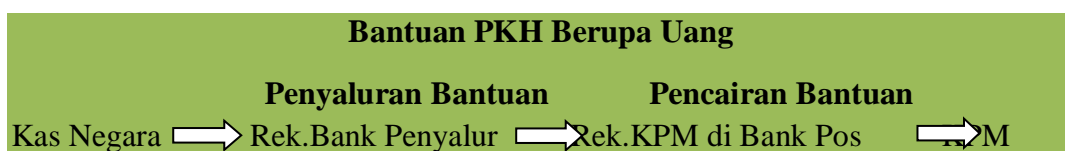
## 8. Anggaran

Anggaran untuk bantuan PKH berasal dari dana bantuan sosial di Kemensos, PKH sendiri dikelola oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, pada tahun 2017, alokasi anggaran untuk penerima manfaat PKH adalah Rp 12.736.176.016.000 (12,7 T) untuk 6,2 juta KPM. Anggaran ini sepenuhnya diperuntukkan sebagai dana bantuan 6,2 juta penerima manfaat PKH.<sup>28</sup>

## 9. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaannya. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Mulai 2017, penyaluran bantuan PKH berubah dari system pemberian tunai ke non tunai. Hal ini dilakukan dalam rangka perluasan inklusi keuangan melalui Bantuan Sosial Non Tunai yang disalurkan melalui E-Warung KUBE-PKH dan agen bank. Penyaluran non tunai KPM PKH didampingi oleh pendamping PKH dari petugas bank.

Penyaluran Bantuan adalah penyaluran dana bantuan PKH yang disalurkan dari Rekening Pemberi Bantuan Sosial ke Rekening Penerima Bantuan Sosial.



*Gambar 3.3 Alur Penyaluran PKH Dengan Sistem Bantuan Tunai*

<sup>27</sup> Ibid, h. 207

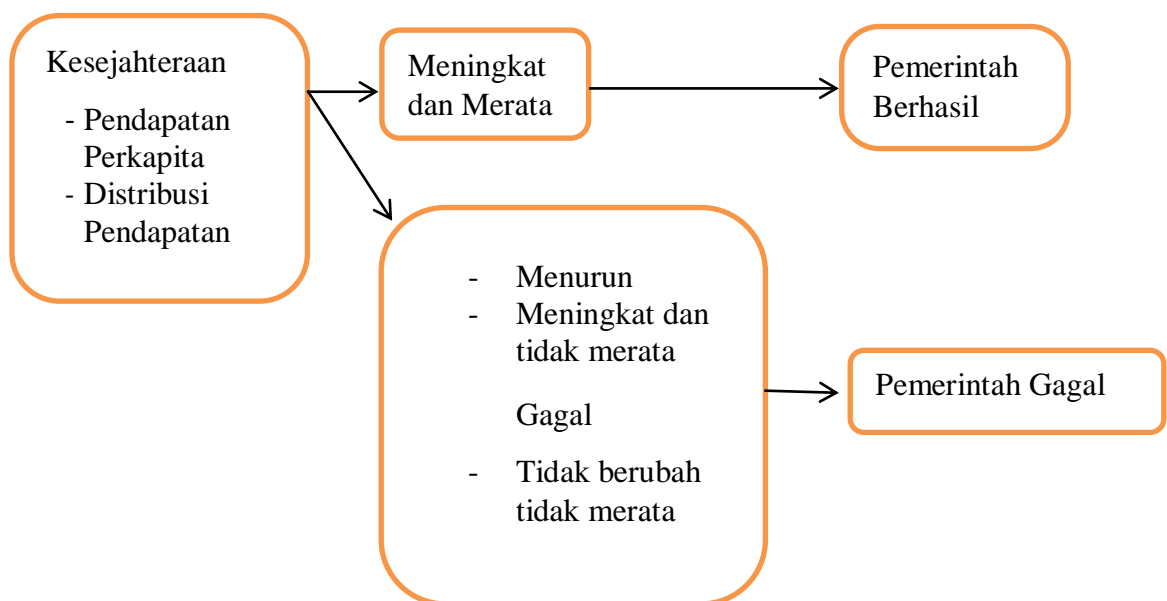
<sup>28</sup> Ibid

Perubahan sistem menjadi bantuan non tunai ini mempersingkat alur penyaluranol bantuan dari sistem bantuan tunai yang sebelumnya dilakukan, sekaligus mengubah lembaga penyalur bantuan dari PT. Pos Indonesia ke sistem Perbankan.

## C. Kemiskinan

### 1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>29</sup>



Gambar 3.4 Tingkat Kesejahteraan

<sup>29</sup>Yani Abdillah, Isnaini Harahap, Marliyah, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, Cetakan Pertama, 2015, h.45.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan tersebut ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Absolute

Pendekatan ini melihat pada batas minimum yang harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan minimum suatu keluarga. Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui jumlah keluarga miskin. Dengan batas minimum yang sama akan dapat diperbandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Kelemahan pendekatan ini adalah pada kenyataan bahwa kebutuhan setiap keluarga tidak akan sama karena tergantung pada waktu dan tempat. Namun demikian pendekatan ini masih banyak digunakan terutama terkait dengan perbandingan jumlah penduduk miskin.

b. Pendekatan Relatif

Pendekatan ini membandingkan anatara pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan rata-rata pendapatan populasi. Pendekatan ini lebih melihat pada ketidakseimbangan pendapatan. Selama ketidakseimbangan pendapatan ada maka kemiskinan akan tetap.

c. Pendekatan Kebutuhan Dasar

Pendekatan ini yang dikemukakan oleh Townsend menekankan pada dua unsur penting, yaitu: Pertama, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi pendapatan yang tidak dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan substansi pangan, papan, pakaian, dan barang-barang rumah tangga tertentu, Kedua, Pendapatan tersebut juga tidak dapat memenuhi jasa-jasa penting lainnya, seperti air minum yang aman, sanitasi, transportasi umum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.<sup>30</sup>

Mudhajir, menyatakan bahwa kemiskinan mencakup:

- 1) Kekurangan fasilitas bagi kehidupan yang normal
- 2) Gangguan dan tingginya resiko kesehatan
- 3) Resiko keamanan dan kerawanan kehidupan social ekonomi dan lingkungannya
- 4) Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tak bisa hidup layak

---

<sup>30</sup>Ibid, h. 52

- 5) Kekurangan dalam kehidupan social yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan rendah.<sup>31</sup>

Selain itu memahami kemiskinan secara multimendisional Pada prinsipnya, standar hidup disuatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal atau pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.<sup>32</sup>

Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa kemiskinan itu pada hakikatnya langsung berkait dengan sistem masyarakat secara menyeluruh dan bukan hanya ekonomi atau politik sosial dan budaya. Sehingga peanggulangannya harus berlangsung secara menyeluruh dengan suatu strategi kaitan-kaitan semua aspek dan berkehidupan manusia. Bisa dimulai dengan resep ekonomi, kemudian ditunjang oleh tindakan sosial. Namun demikian, dalam kenyataannya bahwa masalah memerangi kemiskinan sering kali menjadi suatu masalah perdebatan diantara mereka yang merasa ada kaitannya dengan masalah tersebut, yaitu berkenaan dengan cara dan sasarannya. Adanya berpendapat bahwa memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang tergolong miskin, seperti orang tua, cacat, anak-anak yang orang tuanya miskin, orang yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan.<sup>33</sup>

## 2. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya berzakat, berinfak, membiayai peperangan, diperintahkan untuk menjalankan haji dan sebagainya. Bagaimana mungkin, umat Islam mampu melakukan semua perintah

---

<sup>31</sup>Darwin Muhajir, *Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*, (Yogyakarta: Benang Merah, 2005 ), h. 156.

<sup>32</sup>Crisdawani Suryawati. Jurnal:Memahami Kemiskinan secara Multimendisional

<sup>33</sup>Wahyu M.S., *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional ), h.203.



tersebut bila hidup dalam kemiskinan, sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an Q.S. Al-Anfal: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ  
وَعَدُوَّكُمْ وَأَجْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لِاتَّعْلَمُوْنَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apasajakah yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan di aniaya” (Q.S. Al-Anfal : 60).<sup>34</sup>

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam mendorong masyarakatnya untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam. Kemiskinan adalah musuh besar umat Islam, karena itu umat berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya. Allah SWT tidak pernah memerintahkan penganutnya menjadi orang miskin, kalau kita baca seluruh ayat dalam al-Quran, maka tidak akan pernah menjumpai ayat yang memerintahkan umat Islam menjadi miskin. Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran dan kemiskinan akan menjadikan manusia pada kekufuran. Oleh karena itulah upaya untuk mengentaskan kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 17

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدْنَا نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ  
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ

Artinya: “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat (Q.s. Al-Baqarah:17).

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya, h. 145

Islam dengan ajarannya yang komprehensif telah menyediakan solusi dalam menghadapi kemiskinan, utamanya dalam permasalahan distribusi pendapatan dan akses permodalan, seperti pendapat Mudrajat Kuncoro di atas. Salah satunya adalah dengan Infak. Dimana Infak merupakan sumber pendapatan yang proses perolehan dan pendistribusiannya jelas dan terarah dan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sebagaimana program Keluarga Harapan diberikan keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat terlepas dari kemiskinan sehingga tidak lebih dari sekedar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial. Adanya upaya yang dilakukan dalam Penanggulangan masyarakat miskin melalui lembaga sosial seperti lembaga Dinas Sosial dibawah naungan Kemensos RI.<sup>35</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Penduduk miskin hidup tanpa adanya kebebasan pokok dan pilihan yang lebih baik. Mereka sering kali tidak cukup dalam hal makanan dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan perbedaannya rasa aman seperti layaknya orang hidup. Mereka juga rentan terhadap penyakit, ekonomi yang buruk bencana alam. Masyarakat miskin seringkali mendapatkan perlakuan buruk oleh Negara dan kurangnya kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal tersebut merupakan dimensi dari kemiskinan.<sup>36</sup> Ada empat bentuk kemiskinan.

#### a. Kemiskinan Pendapatan.

Kemiskinan Pendapatan adalah Seseorang dikatakan miskin jika dan hanya, pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sebagai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan khususnya makan.

---

<sup>35</sup>Shafwan Ismail, Sri Sudiarti, M. Ridwan, *Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan* : Volume 2. No.2 Juli-Desember 2018,

<sup>36</sup>World bank, *Global Development finance, 1998* (Washington,Dc, World 1998)

b. Kemiskinan manusia.

Kemiskinan manusia diartikan dengan menggambarkan melalui tiga perspektif kemiskinan-pendapatan, kebutuhan dasar dan kapabilitas-dan merumuskannya dalam satu indeks kemiskinan manusia. Ada tiga elemen yang mencerminkan indeks kemiskinan manusia, yakni: tingkat umur, pengetahuan dan standar hidup yang layak

c. Kemiskinan kebutuhan dasar.

Kemiskinan kebutuhan dasar yaitu kemiskinan merupakan ketiadaan kebutuhan material untuk mencukupi kebutuhan minimal hidup termasuk makan.

d. Kemiskinan kemampuan.

Kemiskinan kemampuan yaitu kemiskinan kapabilitas merupakan tidak adanya kemampuan dasar untuk berfungsi sebagai manusia karena tidak adanya kesempatan untuk mencapainya.<sup>37</sup>

#### 4. Penyebab Kemiskinan

Adapun menurut Departemen Sosial RI pada tahun 2005 menyebabkan ada dua faktor yang menjadi penyebab kemiskinan itu bisa terjadi, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan adalah:

- 1) Gangguan fisik berupa mengalami kecacatan, kurang gizi, hingga sakit-sakitan
- 2) Intelektual yang meliputi gangguan berupa kebodohan, minimnya pengetahuan, dan sempitnya pengetahuan informasi
- 3) Mental emosional yang dipengaruhi rasa malas, mudah menyerah, putus asa, dan temperamental
- 4) Rendahnya nilai spiritual pada diri seperti berlaku tidak jujur, menipu, serakah, maupun tidak disiplin.

---

<sup>37</sup>Yani Abdillah, Isnaini Harahap, Marlitah. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, Cetakan Pertama, 2015, h . 45.

- 5) Adanya gangguan pada sosial psikologis berupa kurang motivasi, tidak percaya diri, depresi, minimnya jaringan relasi dan sulit dalam mencari dukungan
  - 6) Adanya ketimpangan keterampilan yang tidak sesuai dengan yang diminta lapangan pekerjaan.
  - 7) Ketiadaan dalam penugasan aset berupa tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja.
- b. Faktor eksternal

Adapun faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab kemiskinan diantaranya ialah:

- 1) Adanya keterbatasan pada pelayanan sosial dasar
- 2) Tidak terlindunginya hak atas kepemilikan tanah
- 3) Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor formal.
- 4) Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil di masyarakat
- 5) Belum optimalnya dalam mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat
- 6) Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural
- 7) Kemajuan dan kesejahteraan yang kurang didukung oleh budaya yang berkembang
- 8) Kondisi geografis yang terpinggirkan, tandus, atau daerah bencana
- 9) Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- 10) Pembangunan ekonomi antar daerah yang masih belum merata
- 11) Adanya kebijakan yang tidak sepenuhnya memihak pada rakyat miskin.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus di Padang Mariaman*, (Jakarta: Indonesia, 2006), h .66-68.

## **D. Penanggulangan Kemiskinan**

### **1. Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perpekstif Islam**

Islam menugaskan negara menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat islam. Islam membagi kebutuhan dasar (al-hajat al asasiyah) menjadi dua, pertama kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut penelitian Yusuf Qardhawi, langkah untuk penanggulangan kemiskinan ialah:

- a) Menggalakkan kerja dikalangan kaum miskin, baik dengan menyemangati maupun dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Kaum miskin harus terus ditingkatkan etos dan semangat kerjanya
- b) Mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, dimana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin.
- c) Mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat, agar zakat mampu berdaya guna dalam perekonomian
- d) Jaminan dari perbendaharaan Negara (baitul maal)
- e) Mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan diluar kewajiban zakat untuk kaum muslim
- f) Menganjurkan sedekah yang sifatnya suka rela.<sup>39</sup>

### **2. Penanggulangan Kemiskinan Menurut Alqur'an<sup>40</sup>**

Problematika sosial yang kita hadapi di dunia ini, yang salah satunya adalah kemiskinan ini telah diwanti-wanti oleh alQur'an. Sehingga sebenarnya al-Qur'an telah melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kemiskinan yang bergitu luas di kalangan penduduk bumi ini. Kemiskinan ini sangatlah berbahaya, baik untuk diri sendiri maupun untuk agama kita tercinta Islam. Berapa banyak orang-orang yang pindah agama lain Karena mie instan satu kardus. Bahkan, demi

---

<sup>39</sup>Qardhawi, Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 25

<sup>40</sup>Ibid, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, Cetakan Pertama, 2015, h.55-58.

menyambung hidup mereka rela mengorbankan akidah. Inilah bahayanya penyakit yang dinamakan kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“*Hampir saja kefakiran itu menyebabkan kepada kekufuran* diriwayatkan oleh Ahmad Bin Muni’ ”

Maka dari itu, al-Qur’an telah memberikan beberapa strategi/langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan ini diantaranya:

a) Alqur’an menyeru untuk bekerja dan Berusaha

Allah SWT melarang kita untuk hidup bermalasmalasan. Bahkan Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu giat bekerja dan berusaha. Bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rizki Allah SWT. Hal ini disebabkan Allah SWT telah menyebarkan rizki itu dari berbagai sumber yang kita tidak tahu dari sumber yang mana rizki kita itu. Dengan tegas, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini mencari fadlillah (rizki), seperti firmanNya yang tertuang dalam surat al-Jumu’ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)

Artinya : “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung*”. (QS. Al Jumu’ah :10)

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa mencari kehidupan ukhrawi itu lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun tidak boleh bagi kita untuk melupakan kehidupan dunia ini. Hal ini dikarenakan kehidupan dunia itu merupakan jembatan menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akherat. Bekerja itu bisa dikatakan bukanlah suatu ‘kewajiban’, namun ia adalah sebuah kebutuhan. Jika kemiskinan menjangkiti kita, maka ketenangan untuk menggapai kehidupan akherat itu akan terganggu. Bekerja dan berusaha ini

mutlak diperlukan guna menunjang kehidupan kita di dunia ini. Tanpa adanya usaha sangat sedikit peluang untuk menjadi sukses dalam menapak hidup ini

b) Hidup Hemat dan tidak Berlebih-lebihan

Islam serta tidak berlebih-lebihan karena Allah sangat membenci sikap berlebih-lebihan. Allah SWT melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Allah SWT bahkan menyatakan bahwa orang yang suka berlebih-lebihan itu termasuk saudaranya syaitan. Allah Swt berfirman pada Surat al-Isra' ayat 26-27.

وَأْتِ ذَا الْقُورَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا أَجْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S. Al-Isra’: 26-27)

Ayat di atas menjelaskan bahwa selain berbakti, berkhidmat, dan menanamkan kasih sayang, cinta, dan rahmat kepada orang tua, ita pun hendaknya memberi bantuan kepada kaum keluarga yang dekat karena mereka paling utama dan berhak untuk ditolong. Allah memerintahkan manusia untuk berbakti dan berbuat baik tidak hanya kepada orang tua saja, namun masih harus berbuat baik kepada tiga golongan lain, yaitu: kepada kaum kerabat, orang miskin dan orang terlantar. Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros.

Mereka dikatakan sebagai saudara setan karena suka mengikuti dan sangat penurut kepadanya. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak mengandung ketaatan. Jika kita berlebih-lebihan di muka bumi ini maka akan terjadi kerusakan-kerusakan akibat keserakahan kita. Hal inilah yang memnyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup seperti pemanasan global yang santer dibicarakan akhir-akhir ini. Demikianlah beberapa langkah al-Qur’an untuk mengurangi ataupun mengentaskan kemiskinan yang selama ini melanda Negara-negara yang terutama memajukan diri.

### **3. Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kebijakan**

Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil kumulatif dari seluruh proses pembangunan. Setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor swasta, bahkan pengangkatan pegawai hasilnya akan berkontribusi terhadap upaya penanggulanagan kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung. Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan kemiskinan, program-program yang diajukan langsung secara khusus kepada penduduk miskin semakin diperlukan. Program semacam ini dikategorikan sebagai program penanggulangan kemiskinan yang afirmatif, artinya program-program tersebut memang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran penduduk miskin secara individu, keluarga maupun rumah tangga, melalui komunitasnya maupun melalui sumber penghidupannya.

Penanggulangan kemiskinan ditopang oleh 3 kebijakan yaitu:

1) Kebijakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, mengarahkan kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat, yang dilakukan melalui|:

- a) Peningkatan promosi potensi SDA serta kemudahan pelayanan perijinan
- b) Peningkatan keamanan wilayah melalui koordinasi yang intensif.
- c) Peningkatan kapasitas lembaga keuangan masyarakat (BUMDES)
- d) Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi

2) Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah. Upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai upaya yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa tertinggal, terluar, pesisir, perbatasan dan pasca bencana:



- a) Peningkatan pembangunan sarana prasarana angkutan
- b) Peningkatan sarana prasana dasar jalan
- c) Pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika
- d) Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan
- e) Penganadalian laju pertumbuhan penduduk

3) Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka memenuhi aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya lam, rasa aman dan berpartisipasi dalam pemabangunan, dengan memanfaatkan informasi dan teknologi antara lain:

- a) Peningkatan diversifikasi pangan
- b) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- c) Pembangunan sarana prasana kelistrikan
- d) Pembangunan sarana prasarana komunikasi
- e) Peningkatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi
- f) Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata dan proposional
- g) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
- h) Pelestarian Sumber Mata Air
- i) Pengendalian pengelolaan lingkungan
- j) Pengendalian pencemaran sungai
- k) Pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan.<sup>41</sup>

#### **4. Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Program-Program Pemerintah**

##### 1) Program Keluarga Harapan

Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga produktif adalah bagian dari program

---

<sup>41</sup>Bapeda, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, 2017-2022, h. 132

unggulan Pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Ketiganya merupakan upaya Pemerintah memperbaiki program kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Upaya perbaikan tersebut berupa pemberian:

- a) Simpanan produktif
- b) Kesempatan berusaha dan bekerja
- c) Keberlanjutan pendidikan anak dan
- d) Jaminan kesehatan.

Dengan demikian pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan produktif. Satu Salah satu perbaikan program tersebut diantaranya dengan diperkenalkannya penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan agar penyaluran program bantuan tunai dapat lebih baik dan lebih efisien. Kartu Perlindungan Sosial adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

Sebagai penanda Rumah Tangga miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu Perlindungan Sosial Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT. Pos Indonesia.

Adapun syarat dan ketentuan penyampaian Kartu Perlindungan Sosial:

- a) Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota rumah Tangga berhak menerima Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Penerima program Bantuan Sosial harus dapat menunjukkan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program. Ketidaksesuaikan nomor Kartu keluarga membatalkan pengambilan manfaat program
- c) Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu
- d) Kartu tidak dapat dipindahtangankan

Bagi rumah Tangga Penerima Kartu Perlindungan Sosial, cara memanfaatkan Kartu perlindungan Sosial untuk mendapatkan Program RASKIN adalah sebagai berikut:

- a) Rumah Tangga Sasaran membawa Kartu Perlindungan Sosial ke titik Bagi
  - b) Rumah Tangga sasaran mengambil Beras RASKIN di titik Bagi dengan menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial
  - c) Rumah Tangga Sasaran dapat membawa pulang 15 kg Beras RASKIN setiap Bulannya dengan harga tebus Rp.1.600/kg dititik Bagi
- 2) Program penanggulangan kemiskinan terbagi atas tiga kelompok klaster.
- Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden telah mengeluarkan perpres No. 15 tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan (*Klaster*) yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>
- a) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasir Keluarga Klaster I

---

<sup>42</sup>Ibid, h. 137

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan social bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok program dalam penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan social adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan social dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan social ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

#### b) Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Klaster II

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sosial secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan serta pelaksanaan program.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada kelemahan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkan.

c. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok dalam mengembangkan potensi yang ada guna mendorong mereka untuk berkembang secara mandiri

d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan tersebut

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Wilayah, Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal
- b. Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sector tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat disuatu wilayah.

Penerima kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

- c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil klaster III.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

- a. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro  
Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro keuangan/perbankan yang dijamin pemerintah
- b. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar

Memberikan akses yang luas dalam berusaha melakukan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestic maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini adalah tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

c. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil.

Program Penanggulangan Berdasarkan Kalaster Upaya menanggulangnya:

Klaster I Program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dengan upaya:

Upaya 1 Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan arah kebijakan:

- 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun
- 2) Peningkatan kualitas kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan SPM
- 3) Penerapan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) dan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif
- 4) Pengembangan kapasitas dalam rangka pencapaian SPM, MBS dan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif

Upaya 2 Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan kebijakan:

- 1) Memberikan sarana insentif dan sarana transportasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas didaerah terpencil
- 2) Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin melalui skim jaminan kesehatan masyarakat dan sejenisnya
- 3) Peningkatan dan pengawasan peredaran obat-obatan dan perbekalan kesehatan

Klater II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan Upaya 1. Dengan Meningkatkan pelayanan Terpadu Terhadap Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari pembangunan disuatu daerah. Indikasi suatu masyarakat diaktakan sejahtera secara sosial, apabila didaerah tersebut persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain: Balita, anak maupun lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, anak nakal dan korban narkoba, anak jalanan, wanita rawan social ekonomi, dan fakir miskin dan lainnya tidak lagi menjadi permasalahan daerah. Adapun arah kebijakannya, adalah:

- a) Pelaksanaan program kegiatan sosial seperti pemberian bantuan sosial seperti dan pealaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b) Penyediaan sarana prasarana social (panti sosial dan luar panti)
- c) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta usia lanjut tidak berpontesial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu
- d) Penanggulangan korban bencana berupa bantuan yang tepat guna dan produktif

Upaya 2 Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dengan optimalisasi penguasaan faktor-faktor produksi. Masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal utamanya adalah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan, petani tanpa lahan atau lahan kurang dari 1 Ha, buruh tani dan buruh lepas di perkebunan. Terkait dengan kompleksitas permasalahan kemiskinan, maka upaya pemberdayaan masyarakat, dimana arah kebijakannya adalah:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan
- b) Mengutamakan petani miskin tanpa lahan dalam pembagian lahan dari pembukaan lahan pertanian baru



- c) Menjamin sumber daya pesisir dan laut terhindar dari kerusakan akibat penggunaan alat tangkap yang merusak, alih fungsi hutan mangrove dan pencemaran
  - d) Pembinaan usaha produktif dan peningkatan akses dan layanan permodalan dengan memberikan skim khusus (bunga rendah)
  - e) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dalam pengentasan kemiskinan
  - f) Membuat pola penyelesaian konflik agrarian dengan semangat optimalisasi reformasi agrarian
  - g) Pelibatkan sektor swasta didalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Klaster III Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan upaya

Upaya 1 Perbaiki iklim investasi dan Usaha, dengan arah kebijakannya:

- a) Membuat sistem prosedur perijinan yang mudah dan cepat
- b) Merancang peraturan daerah yang mendukung iklim investasi dan usaha yang kondusif
- c) Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat
- d) Menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha
- e) Jaminan terhadap ketersediaan lahan dan status hukumnya
- f) Penetapan kawasan sesuai dengan peruntukannya yang diatur melalui perda rencana Tata Ruang Wilayah
- g) Jaminan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang fungsional
- h) Pengembangan kualitas sumber daya manusia

Klaster IV Program-program baik langsung dan tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan upaya

Upaya 1 Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat dengan arah kebijakannya:

- a) Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah

- b) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau
- c) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

Upaya 2 Peningkatan cakupan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan sekolah formal dengan kebijakan:

- a) Mengurangi kesenjangan rasio sekolah, guru dan murid antar satuan pendidikan di sekolah negeri, swasta dan pendidikan luar sekolah
- b) Mengurangi kesenjangan ketersediaan peralatan sekolah diantara sekolah negeri, swasta dan pendidikan luar sekolah
- c) Peningkatan sarana prasarana pendidikan

Upaya 3 Peningkatan cakupan dan kualitas sarana prasarana kesehatan, dengan kebijakan:

- a) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan peralatan di setiap sarana kesehatan dengan melakukan distribusi dan pemerataan berdasarkan kewilayahan
- b) Peningkatan kapasitas dengan kesehatan
- c) Pengadaan fasilitas kesehatan. <sup>43</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Nama	Metode	Hasil Penelitian
1	Ridho Diana, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perpektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilay"	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan teori, penelitaian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jawa masuk dalam kategori tidak baik, maksudnya hal ini dapat dilihat melalui garis kontinum skor yang didapatkan untuk efektivitas

<sup>43</sup> Ibid, h. 139.

			<p>program keluarga harapan (PKH) terhadap pengurangan kemiskinan adalah 1.080 dengan persentase 33% dengan kategori tidak baik. Dilihat dari pertanyaan sebaran kuisioner diatas menunjukkan adanya ketidakefektivan yang terlaksan di desa kota jawa seperti kurang intesifnya pertemuan yang dilakukan antara pendamping dengan peserta penerima bantuan. Serta pemotongan dana untuk transportasi yang dikarenakan jarak antara desa kota jawa dengan tempat pencairan dana cukup jauh. Penggunaan dana yang tidak digunakan untk modal dan membuka usaha sehingga bisa mengurangi kebutuhan pokok baik berupa untuk diri sendiri maupun masa depan seperti menabung. Dan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan.</p>
2.	<p>Elvira Astuti Pane, <i>“Efektifitas Program Beras Sejahtera (Rastra) Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.”</i></p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Efektifitas program beras sejahtera di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dapat dilihat dari 5 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemahaman Program Berdasarkan hasil analisa data, bahwa pemahaman program beras sejahtera di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sudah berjalan efektif dengan jumlah rata-rata 0,61 yang paham terhadap program beras sejahtera, hal ini Karena dikarenakan mayoritas responden rutin mengikuti sosialisasi yang diadakan tiap bulan sebelum pembagian beras.</li> <li>3. Ketetapan Sasaran Berdasarkan hasil analisis data, bahwa pemilihan rumah tangga miskin penrima manfaat sudah tepat</li> </ol>

			<p>sasaran dengan jumlah rata-rata 0,57 dilihat dari penetapannya yang dilakukan oleh pihak desa, perwakilan penerima manfaat Rastra serta tim coordinator program Rastra yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dalam musyawarah desadan tertulis di pagu Rastra.</p> <p>4. Ketetapan Waktu Berdasarkan hasil analisa data, bahwa proses pelaksanaan program Rastra di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan adalah efektif dengan jumlah rata-rata 0,48.</p> <p>5. Berdasarkan hasil analisis data, bahwa kondisi responden sebelum dan sesudah menerima Rastra adalah netral dengan rata-rata 0,06</p> <p>6. Tercapainya tujuan Berdasarkan analisis data, bahwa tujuan program Rastra tercapai di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan adalah Efektif dengan jumlah rata-rata 0,39 dimana responden merasa terbantu dalam hal pengurangan beban pengeluaran serta terbantu dalam mengurangi kebutuhan pangan.</p>
3.	Tirtado Sinaga, <i>“Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Selayang.”</i>	Kualitatif	Penelitian ini menemukan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Selayang telah berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal, refleksi kemiskinan, pelaksanaan program monitoring bejalan dengan baik dan

			keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat didukung oleh efektivitas organisasi pelaksana dalam member pembelajaran, pendampingan, kemandirian bagi masyarakat miskin.
4.	Moch Ryan Wanda Hidayat, <i>“Efektifitas Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Penerima Manfaat di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”</i> .	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian pertama, pertama hasil pelaksanaan PKH komponen pendidikan di Desa Ajung belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan penerima manfaat menggunakan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membayar utang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan modal untuk berjudi, sehingga pemanfaatan dana Program Keluarga Harapan kurang efektif dalam mencapai dalam mencapai tujuan program. Kedua, komponen kesehatan juga belum efektif. Dikarenakan penerima manfaat jarang pergi ke posyandu dan tidak memperhatikan gizi anak. Ketiga, pendamping yang pragmatis dan permisivisme, yaitu sikap pembiaran yang dilakukan oleh pendamping mengakibatkan kurangnya control terhadap pemanfaatan penerima dana Program Keluarga Harapan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan Mixed Methods dengan pendekatan metode campuran antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif secara kuisioner dan penelitian kualitatif digunakan sebagai memperkuat data dari kuisioner.

#### **B. Penentuan lokasi dan waktu penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 sampai dengan selesai

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>45</sup> Maka dari penjelasan para ahli diatas, penulis

---

<sup>44</sup>Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), h. 173.

<sup>45</sup>Sugiono, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80.

menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Penerima PKH di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 980 orang. Untuk memperjelas jumlah populasi jumlah masyarakat Penerima PKH, maka rincian atau klasifikasi golongan/tingkatan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

No	Nama Desa	Populasi
1.	Aek Garingging	41
2.	Aek Manyuruk	19
3.	Bandar Limabung	19
4.	Boncah Bayuon	27
5.	Dalan Lidang	18
6.	Kampung Baru	111
7.	Lancat	31
8.	Lobung	39
9.	Pangkalan	58
10.	Parbatasan	52
11.	Per.Simpang Gambir	14
12.	Sikumbu	20
13.	Simpang Bajole	34
14.	Simpang duku	27
15.	Simpang Durian	209
16.	Simpang Gambir	128
17.	Simpang Koje	48
18.	Tangsi Atas	3
19.	Tapus	82
Jumlah		980

*Sumber : Dinas Sosial Panyabungan*

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi diteliti.<sup>46</sup> Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Arikunto “Purposive Sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan

<sup>46</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Yogyakarta : CV. Rineka Cipta.2013), h.174.



yang berfokus pada tujuan tertentu”. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (N + a^2)}$$

$$n = \frac{980}{1 + (980 + 10\%^2)}$$

$$= \frac{980}{1 + (9,8)}$$

$$= \frac{980}{10,8} = 90,7$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, peneliti mendapatkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 91 orang.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:

##### **1. Data primer**

Yaitu sumber data utama yang diambil atau yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer tersebut didapatkan dari Kepala Jaminan Sosial dibidang Sosial Kabupaten Mandailing Natal Dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Data primer ini juga merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data pendukung yang berkaitan dengan penelitian, data ini diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini juga merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.

## **E. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Objek penelitian yang menjadi pusat penelitian adalah peserta penerima PKH yang berdomisili di Kecamatan Lingga Bayu.

## **F. Teknis dan Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga macam metode, yaitu:

### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dan adapun isi wawancara tersebut adalah berkaitan dengan rumusan masalah yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

### **2. Angket (*kuisoner*)**

Metode kuisoner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.<sup>47</sup> Kuisoner pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran Guttman. Skala Guttman adalah apabila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu masalah yang ditanyakan seperti “ya” dan “tidak”. Jika capaian hasil kuisoner mencapai dibawah 50% maka objek yang diteliti kurang efektif. Jika capaian hasil kuisoner mencapai diatas 50% -100% maka dapat dikatakan objek yang diteliti mendekati efektif dan efektif. Untuk penilaian jawaban positif diberi skor 1 dan negative diberi skor 0. Dalam hal ini kuisoner ditujukan kepada peserta PKH Kecamatan Lingga Bayu.

---

<sup>47</sup>Soeratno dan Lincollin Arsyad, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Lima, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2008), h. 83.

### 3. Dokumentasi (*documentation*)

Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data yang relevan<sup>48</sup>

## G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Selanjutnya Moleong berpendapat bahwa analisis data dapat juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian.<sup>49</sup> Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen terkait dengan Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayudianalisis dengan cara menyusun menghubungkan dan mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari: (a) reduksi data, (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan. Dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung. Pada tahap awal pengumpulan data, fokus penelitian masih melebar dan belum tampak jelas, sedangkan observasi masih bersifat umum dan luas. Setelah fokus semakin jelas maka peneliti menggunakan observasi yang lebih berstruktur untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.

### 1 Reduksi Data

Setelah data penelitian yang diperlukan dikumpulkan, maka agar tidak bertumpuk-tumpuk dan memudahkan dalam mengelompokkan serta dalam menyimpulkannya perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dalam hal ini sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan,

---

<sup>48</sup>Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.117

<sup>49</sup>J Lexxy, Meleong, *Metodologi*, h.87.

pengabstrakan dan transformasi data mentah/kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengungkapkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Adapun data yang sudah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan(PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang akan dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

## **3. Kesimpulan**

Data penelitian pada pokoknya berupa kata-kata, tulisan dan tingkah laku sosial para sektor yang terkait dengan aktivitas tentang Analisis Efektifitas Penyaluran Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Lingga Bayu. Aktivitas ini mencakup kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan terhadap individu, keluarga, masyarakat, yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak di Kecamatan Lingga Bayu<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Ibid., h. 88.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Lingga Bayu**

###### **a. Letak Geografi/Kecamatan**

Lingga Bayu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan ini terdiri dari 19 Desa yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan. Letak geografis dan wilayah administratif kecamatan Lingga Bayu memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sinunukan dan Ranto Baek
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sinunukan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal

Luas wilayah Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan peta administratif adalah 192,67 Km<sup>2</sup>. Dan ketinggian diatas permukaan laut 500-7000 Meter. Di kecamatan Lingga Bayu sebagian warga masyarakat bergerak dibidang pertanian, luas panen di komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Berikut adalah data tentang luas Panen, menurut jenis tanaman 2017 sebagai berikut:

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Padi Sawah          | : 1781 Ha |
| 2) Padi Ladang         | : 915 Ha  |
| 3) Padi sawah + Ladang | : 2696 Ha |
| 4) Jagung              | : 384 Ha  |
| 5) Ubi Kayu            | : 5 Ha    |
| 6) Ubi Jalar           | : 2 Ha    |
| 7) Kacang Tanah        | : 6 Ha    |
| 8) Kacang Kedelai      | : 225 Ha  |
| 9) Kacang Hijau        | : 3Ha     |

Secara geografis letak wilayah Kecamatan Lingga Bayu adalah wilayah pesisir, oleh karena itu masih tergolong dalam kategori desa. Dikarenakan sebagian masyarakat masih memanfaatkan lahan disekitar sebagian lahan pertanian.<sup>51</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan**

Kecamatan Lingga bayu terdiri dari beberpa suku diantaranya suku jawa, mandailing, melayu dan masih ada yang lainnya. Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak dibidang pertanian, disamping pertanian atau bercocok tanam. Sangat potensial juga dibidang perternakan, perdagangan dan industri kecil atau industri rumah tangga.

##### 1) Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka untuk mencapai keseimbangan pembangunan daerah yang serasi yang berkelanjutan dengan proses pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang program penanggulangan kemiskinan melalui program penyediaan prasarana dan sarana pembangunan perekonomian rakyat ini akan memberikan suatu kerangka upaya pemanfaatan potensi wilayah Kecamatan yang menekankan kepada sinergi tiga hal pokok yaitu integritas kebijaksanaan pengembangan wilayah, sinkronisasi kegiatan pembangunan sektor, dan akomodasi atas potensi dan kebutuhan masyarakat.

##### 2) Topografi

Secara keseluruhan Kecamatan Lingga Bayu terdiri dari daratan, lereng/punggung bukit.

##### 3) Penduduk

Populasi penduduk yang mencapai 24.409 jiwa hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>BPS MADINA, *kecamatan Lingga Bayu dalam Angka 2018* (Panyabungan: CV. Rilis Grafika, 2018) h. 3.

<sup>52</sup>Ibid, h. 4

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Masyarakat Kecamatan Lingga Bayu Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Tahun 2017**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1516	1398	2914
2	5-9	1512	1394	2906
3	10-14	1452	1305	2757
4	15-19	1344	1246	2590
5	20-24	1021	984	2005
6	25-29	849	826	1675
7	30-34	765	779	1544
8	35-39	746	755	1501
9	40-44	667	686	1353
10	45-49	648	676	1324
11	50-54	575	594	1169
12	55-59	461	475	936
13	60-64	349	369	718
14	65-69	206	247	453
15	70-74	112	165	277
16	75+	100	187	287
<b>Kec. Lingga Bayu</b>		<b>12323</b>	<b>12086</b>	<b>24409</b>

Berdasarkan dari tabel 4.1 diatas bahwa, Tingginya angka golongan umur nol sampai empat tahun menggambarkan bahwa angka kelahiran di wilayah ini cukup tinggi, hal ini dapat menjadi faktor yang mendorong penambahan penduduk di wilayah kecamatan Lingga Bayu secara signifikan.<sup>53</sup>

a. Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses. Dan proses itu berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Penerima proses adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju kearah pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan.

Selain itu, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang kehidupan .pendidikan merupakan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian.

---

<sup>53</sup>Ibid, h. 19.

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang penting pula dalam menggambarkan dan mengukur kepatuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana sarana-dan prasarana pendidikan diwilayah kecamatan Lingga Bayu. Dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Sarana dan Prasana Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu tahun**  
**2017-2018**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	23
2.	SMP	4
3.	MTS	2
4.	SMA	1
5.	MA	2

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa prasarana penunjang pendidikan di Kecamatan lingga Bayu cukup baik untuk menunjang pendidikan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Lingga Bayu.<sup>54</sup>

b. Kesehatan

Untuk fasilitas kesehatan masyarakat Kecamatan Lingga Bayu memiliki prasarana kesehatan seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Prasarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Desa/Kelurahan**  
**tahun 2017 di Kecamatan Lingga Bayu**

Sarana Kesehatan							
No	Desa Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poskesdes /Polindes	Posyandu	Jumlah
1.	Tapus	-	-	1	-	2	3
2.	Simpang Durian	-	-	-	-	3	3
3.	Simpang Bajole	-	-	-	1	1	2
4.	Bandar Limabung	-	-	-	1	1	2
5.	Aek	-	-	-	-	2	2

<sup>54</sup>Ibid, h. 25.



	Manyuruk						
6.	Simpang Duku	-	-	-	-	1	1
7.	Simpang Koje	-	-	-	1	2	3
8.	Pangkalan	-	-	-	-	1	1
9.	Lancat Batu Gajah	-	-	-	1	1	2
10.	Sikumbu	-	-	-	1	2	3
11.	Aek Garingging	-	-	-	-	1	1
12.	Per.Simpang Gambir	-	-	-	1	2	3
13.	Simpang Gambir	-	1	-	3	3	10
14.	Lobung	-	-	-	-	1	1
15.	Kampung Baru	-	-	-	1	1	2
16.	Boncah Bayuon	-	-	-	-	2	2
17.	Dalan Lidang	-	-	-	1	1	2
18.	Perbatasan	-	-	-	1	1	2
19.	Tingsi Atas	-	-	-	1	1	2
	<b>Kec. Lingga Bayu</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>46</b>

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Lingga Bayu secara keseluruhan yang ada dikecamatan ini sebanyak 46 sarana kesehatan dengan komponen sarana kesehatan yang berbeda-beda.<sup>55</sup>

## 2. Gambaran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lingga Bayu

### a. Sejarah PKH di Kecamatan Lingga Bayu

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu pada tahun 2012-2017 mengalami fluktuatif dan ditahun 2017 mengalami peningkatan.Hal ini memberikan bukti bahwa segala bentuk program pemerintah belum berjalan secara maksimal termasuk Program Keluarga harapan (PKH), oleh karena itu keefektifan suatu program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian.PKH dikecamatan Lingga Bayu berlangsung sejak

<sup>55</sup>Ibid, h. 39.

tahun 2014. Penyaluran PKH bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada dinegara ini.<sup>56</sup> Melalui PKH pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia diatas 70 tahun dan bagi penyandang disabilitas berat. Bantuan ini tidak diberikan dengan cuma-cuma, penerima bantuan PKH harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta penerima bantuan harus menerima bantuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Komponen penerima bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan diberikan kepada maksimal anggota keluarga sesuai dengan komponen dan kriteria
- b. Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari tiga anggota keluarga, maka bantuan PKH diberikan kepada komponen dengan nilai nominal terbesar
- c. Ibu hamil termasuk dalam komponen, tetapi kehamilan keempat tidak termasuk dalam tambahan komponen kepersetaan.

Berikut ini adalah Penerima PKH di Kecamatan Lingga Bayu

**Tabel 4.4**

**Penerima PKH Di Kecamatan Lingga Bayu Tahun 2016-2017**

No	Nama Desa	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Aek Garingging	1	27	41
2.	Aek Manyuruk	2	8	19
3.	Bandar Limabung	5	9	19
4.	Boncah Bayuon	1	16	27
5.	Dalan Lidang	4	9	18
6.	Kampung Baru	8	65	111
7.	Lancat	5	31	31
8.	Lobung	1	24	39
9.	Pangkalan	11	43	58
10.	Parbatasan	4	41	52

<sup>56</sup>Rahmad, *Operator PKH di Dinas Sosial Mandailing Natal*, Wawancara Pribadi , 14 Mei 2019 pukul 11.45.

11.	Per.Simpang Gambir	1	6	14
12.	Sikumbu	2	17	20
13.	Simpang Bajole	8	23	34
14.	Simpang duku	3	29	27
15.	Simpang Durian	32	150	209
16.	Simpang Gambir	8	91	128
17.	Simpang Koje	31	40	48
18.	Tangsi Atas	1	1	3
19.	Tapus	6	54	82

Berdasarkan pada tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Kecamatan Lingga Bayu pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan meningkatkannya jumlah penerima Bantuan PKH, oleh karena itu keefektifan program PKH di Kecamatan Lingga Bayu perlu dilakukan penelitian, apakah dengan adanya penyaluran Bantuan PKH di Kecamatan Lingga Bayu dapat menanggulangi masalah kemiskinan yang ada selama ini.<sup>57</sup>

#### **b. Implementasi PKH di Kecamatan Lingga Bayu**

Menurut pendaping PKH Kecamatan Lingga Bayu seluruh desa yang ada di Kecamatan Lingga Bayu telah menerima bantuan PKH terhitung sejak tahun 2014, fakta yang ditemukan dilapangan adalah implementasi penetapan peserta penerima PKH dikecamatan Lingga Bayu tidak sesuai dengan kriteria penetapan RTM penerima bantuan sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam implementasi pelaksanaan PKH masih ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercamtum sebagai peserta PKH yang mendapat bantuan tunjangan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin/tidak mampu. Tentu hal ini merupakan kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan yang tidak meratanya penyaluran dari dari Program PKH ini. PKH di Kecamatan Lingga Bayu masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyaknya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tetapi belum mendapat bantuan.

*Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masrida salah satu peserta PKH di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu, mengatakan bahwa:*

---

<sup>57</sup>Data Diolah Dari Dinas Sosial Mandailing Natal, 15 Mei 2019 Pukul 10:15.

*“pada saat pertemuan rutin hampir sebagian dari peserta tidak mengerti atau kurang memahami terhadap tujuan PKH dan pengalokasian sesungguhnya dana PKH, dikarenakan kondisi ruang pertemuan yang kurang kondusif sehingga penyampaian informasi kurang efektif. Serta penentuan peserta yang kurang bijaksana membuat penentuan penerima bantuan tidak tepat sasaran.”*<sup>58</sup>

*Adapun wawancara dilapangan dengan ibu Parida salah satu penerima PKH di Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu ibu ini mengatakan bahwa:*

*“Pada tahun 2018 ini penerimaan dana PKH tidak lagi melalui kantor POS seperti yang sudah dijalankan selama ini, pencairan Dana PKH akan dialihkan melalui ATM, dan dana bantuan yang diterima tidak sepenuhnya diberikan dalam bentuk uang dan setengahnya diberikan dalam bentuk bahan pokok yang bisa didapatkan di E-Warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Namun, di Kecamatan Lingga Bayu penjelasan dari ibu Parida ini belum adanya E-Warung yang ditunjuk Pemerintah Di Desa Penerima PKH ini otomatis harga bahan pokok tentunya mahal dikarenakan tidak berbelanja kebutuhan pokok yang disarankan pemerintah di E-Warung belum adanya di Desa tersebut. Tentu hal ini membuat khawatir para penerima PKH yang dilatarbelakangi belum adanya kesiapan dari pemerintah Dinas Sosial Mandailing Natal.”*<sup>59</sup>

*hasil wawancara dilapangan dengan Ibu Butet Lubis mengatakan Bahwa “Penerima PKH di Desa Perbatasan mendapat bantuan beras dibagi rata dengan masyarakat yang mampu agar tidak ada kecemburuan antar sesama masyarakat desa perbatasan, aparat Desa menagambil kebijakan dengan membagi rata beras yang disalurkan pemerintah ke Desa. Menurut ibu ini tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan.”*<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Masrida, peserta PKH Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2019, Pukul 10:45 WIB.

<sup>59</sup>Parida, peserta PKH Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu, Wawancara Pribadi pada ( 23 Mei 2019 Pukul 10:15 WIB.

<sup>60</sup>Butet Lubis, peserta PKH Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu pa, Wawancara Pribadi, 23 Meil 2019 Pukul 10:15 WIB.

*Berdasarkan dari wawancara dilapangan dengan ibu Masrida, ibu Parida dan juga Ibu Butet Lubis. belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyaknya ketidaktepatan sasaran dalam penerima bantuan PKH, di Kecamatan Lingga Bayu masih banyak ditemukan masyarakat yang kurang memahami arti/tujuan dari PKH sehingga dalam pemanfaatanya kurang efektif. dilakukan aparat Desa Parbatasan dalam mengurangi beban pengeluaran Peserta PKH.*

### **3. Karakteristik Responden**

Pada bagian ini karektetistik responden yang akan dibahas yaitu dimulai dari usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan utama dan jumlah komponen penerima bantuan PKH. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Lingga Bayu dengan jumlah responden 91 orang.

#### **a. Usia Responden**

Usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1.	31-45 Tahun	35	38 %
2.	>46 Tahun	56	62%
<b>Total</b>		91	100%

Berdasarkan dari Data tabel yang diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 31-45 tahun berjumlah 35 orang atau 38%. Sedangkan responden yang berusia >46 tahun berjumlah 56 orang atau 62%.

#### **b. Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 4.6**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Ibu Rumah Tangga	5	6%
2.	Petani	83	91%
3.	Buruh	3	3%
4.	Pedagang	-	-
Jumlah		91	100%

Berdasarkan dari data tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga berjumlah 5 orang atau 6%.Sedangkan pada profesi Petani yaitu berjumlah 83 orang atau 91%.Namun pada profesi Buruh dengan jumlah 3 atau 3%.Pada profesi Pedagang berjumlah 0 atau (tidak ada).

#### **c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Tidak Tamat SD	16	18%
2.	SD/Sederajat	72	79%
3.	SMP/Sederajat	3	3%
4.	SMA/Sederajat	-	-
Jumlah		91	100%

*Sumber Data: Data diolah dari hasil observasi*

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan tingkat Tamat SD berjumlah 16 orang atau 18% dan pada tingkat lulusan SD/Sederajat berjumlah 72 orang atau 79%. Pada tingkat pendidikan Lulusan SMP/Sederajat 3 orang atau 3%.Namun pada tingkat pendidikan di lulusan SMA/Sederajat 0 atau (tidak ada).

#### **4. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.**

Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.

Aspek teori Sondang P. Siagian mengatakan bahwasanya efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalakannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>61</sup> Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM, indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut:<sup>62</sup>

a. Indikator masukan

Merupakan langkah awal kesipan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya pedoman umum dan persiapan sosialisasi

b. Indikator Proses

Merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosiaisasi.

---

<sup>61</sup>Siagian P. Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015 h. 153.

<sup>62</sup>Ridho Diana “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perpekstif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Kota Gowa Kecamatan Way Kanan*” (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018) h. 65.

c. Indikator Keluaran

Setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan

d. Indikator Manfaat

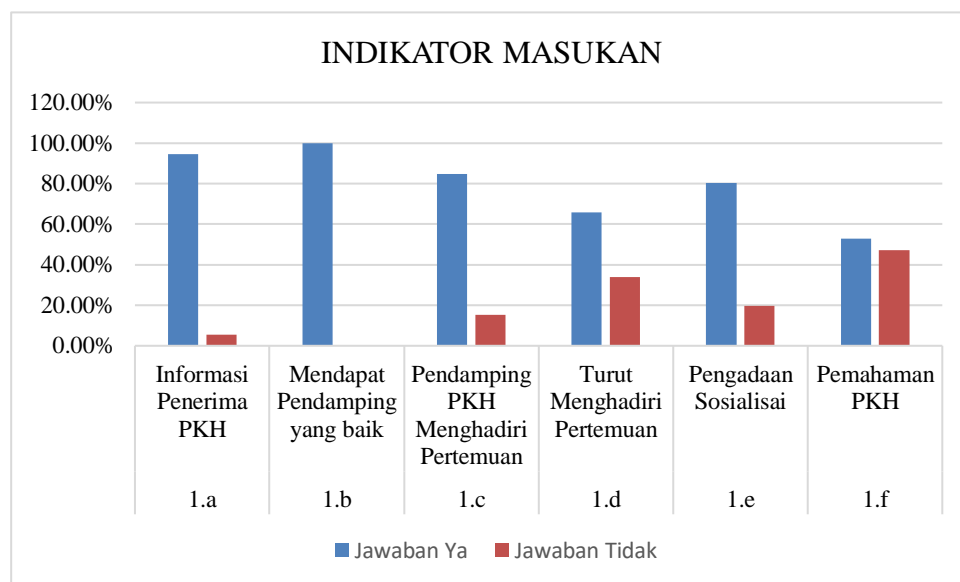
Dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.

e. Indikator Dampak

Merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik.

Perolehan data melalui penyebaran kuisioner (angket) sebanyak 21 pertanyaan untuk 91 sampel/peserta Penerima PKH. Dari hasil sebaran kuisioner diperoleh fakta atau hasil dari pertanyaan yang diajukan pada responden yang tergambar pada Diagram dibawah ini:

**Diagram 4.8 Indikator Masukan**



*Data diolah dari Microsoft Exxel 2013, 3 juli 2019, pukul 10.30 Wib*

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 1.a tentang apakah Ibu mendapat informasi menerima PKH dari Petugas PKH/Pejabat Desa ? Dapat



dilihat dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 94,50 atau 95%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 5,49 atau 5%.

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 1.b tentang apakah Ibu mendapat pendampingan yang baik dari Pendamping PKH? Dapat dilihat dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 100%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah berjumlah 0 atau (tidak ada).

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 1.c tentang apakah Ibu pendampingan PKH menghadiri pertemuan dengan rutin? Dapat dilihat dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 84,61 atau 85%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 15,38 atau 15%.

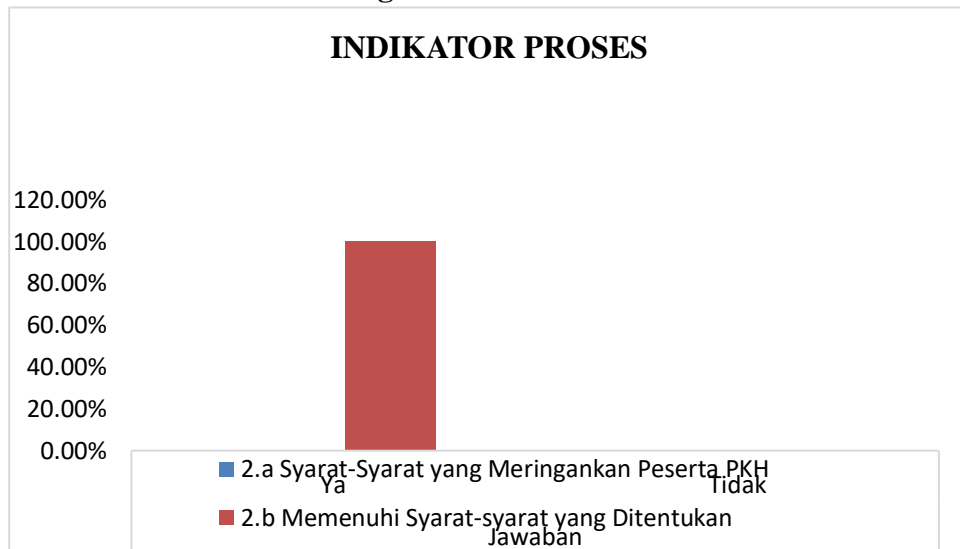
Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 1.d tentang apakah Ibu turut menghadiri pertemuan dengan rutin? Dapat dilihat dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 65,93 atau 66%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 34,06 atau 34%.

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 1.e tentang apakah sebelum pelaksanaan PKH diadakan sosialisasi oleh petugas PKH/ Pemerintah Desa? Dapat dilihat dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 80,21 atau 80%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 19,78 atau 20%.

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 1.f tentang apakah setelah adanya sosialisasi Ibu dapat mengerti tujuan, kewajiban serta hak-hak sebagai peserta PKH? Dapat dilihat dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 52,74 atau 53%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 47,25 atau 47%.

Jadi dapat disimpulkan dari diagram diatas berdasarkan dari Indikator Masukan bahwasanya Pelaksanaan PKH di Kecamatan Lingga Bayu sudah terlaksana dengan baik atau dikatakan sudah efektif. Dikarenakan capaian hasil yang diteliti diatas 50%.

**Diagram 4.9 Indikator Proses**



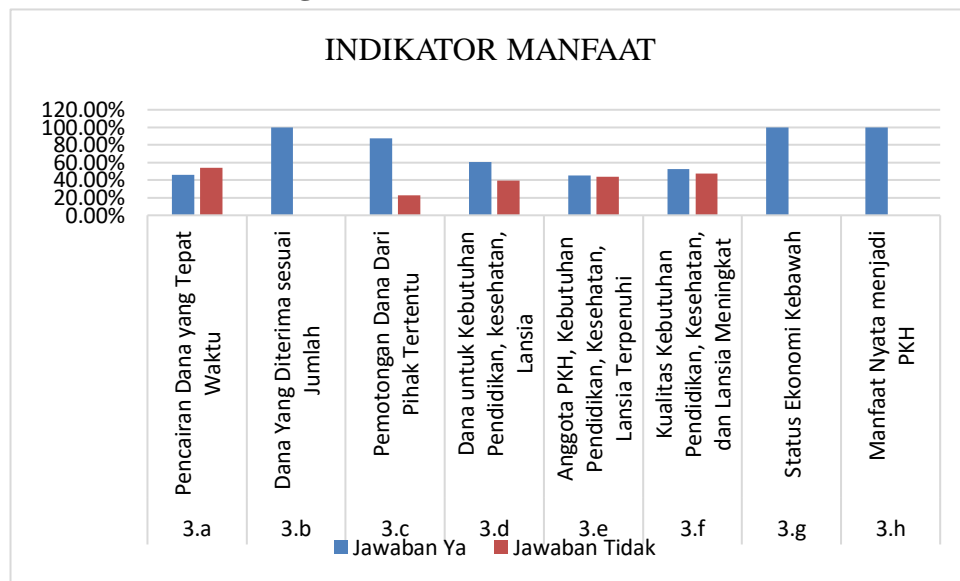
*Data diolah dari Microsoft Exxel 2013, 3 juli 2019, pukul 10.30 Wib*

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 2.a tentang apakah syarat-syarat yang telah ditentukan meringankan Ibu sebagai peserta PKH? Dapat dilihat dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna merah dengan persentase 100%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah berjumlah 0 atau (tidak ada).

Begitu juga dengan sebaliknya pada pertanyaan pada butir 2.b apakah ibu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan? Dapat kita ketahui dari diagram batang diatas sama-sama Jawaban Ya dengan 2.a dengan persentase 100% pada warna merah berjumlah 0 (tidak ada)

Jadi dapat disimpulkan dari diagram diatas berdasarkan dari Indikator proses bahwasanya Pelaksanaan PKH di Kecamatan Lingga Bayu sudah terlaksana dengan baik atau dikatakan sudah efektif. Dikarenakan capaian hasil yang diteliti 100% .

**Diagram 4.10 Indikator Manfaat**



*Data diolah dari Microsoft Exxel 2013, 3 juli 2019, pukul 10.30 WIB*

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 3.a tentang apakah tahap pencairan dana PKH dilakukan tepat waktu? Dapat dilihat dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 46,15 atau 46%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 53,84 atau 54%.

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 3.b tentang apakah dana PKH yang diterima sesuai dengan jumlah yang ditentukan? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 100%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 0 (tidak ada).

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 3.c tentang apakah ada pemotongan jumlah dana dari pihak tertentu? Dapat diketahui dari Diagram Batang diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 87,21 atau 87%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 12,79 atau 13%.

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 3.d tentang apakah dana yang ibu terima digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan kebutuhan bagi lansia dan penyandang distabilitas? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang

menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 60,43 atau 60%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 39,56 atau 40%.

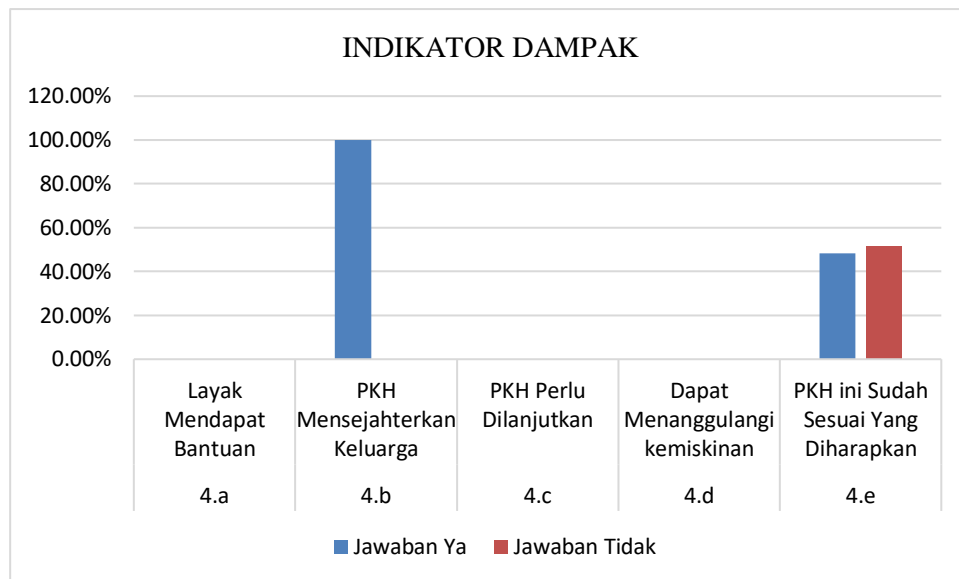
Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 3.e tentang apakah setelah menjadi anggota PKH kebutuhan pendidikan, kesehatan kebutuhan bagi lansia dan penyandang distabilitas? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 45,05 atau 45%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 43,95 atau 44%.

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 3.f tentang apakah dengan adanya PKH kebutuhan pendidikan, kesehatan kebutuhan bagi lansia dan penyandang distabilitas? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 52,74 atau 53%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 47,25 atau 47%.

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 3.g tentang apakah ibu termasuk dalam keluarga status ekonomi kebawah? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 100% atau .Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 0 (tidak ada).

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 3.h tentang apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah menjadi anggota PKH? Dapat diketahui dari Diagram Batang diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 100% atau .Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 0 (tidak ada).

Jadi dapat disimpulkan dari diagram diatas berdasarkan dari Indikator manfaat bahwasanya Pelaksanaan PKH di Kecamatan Lingga Bayu sudah terlaksana dengan baik atau dikatakan sudah efektif pada butir pertanyaan 3.b, 3.c, 3.d, 3.f, 3.g, 3.h. Dikarenakan capaian hasil yang diteliti diatas 50%. Pada pencairan dana dan ada pemotongan dana pada penerima PKH ini merupakan tidak efektif dikarenakan capaian hasil dibawah 50%.

**Diagram 4.11 Indikator Dampak**

*Data diolah dari Microsoft Exxel 2013, 3 juli 2019, pukul 10.30 Wib*

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 4.a tentang apakah ibu layak mendapat bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 100% atau .Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 0 (tidak ada).

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 4.b tentang apakah PKH telah mensejahterakan keluarga ibu? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 100% atau .Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 0 (tidak ada).

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 4.c tentang apakah PKH perlu dilanjutkan? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 100% atau .Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 0 (tidak ada)

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 4.d tentang apakah dengan adanya program PKH ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan? Dapat diketahui dari Diagram Batang diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 100% atau .Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 0 (tidak ada)

Hasil jawaban kuisioner pada butir pertanyaan 4.e tentang apakah program PKH ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu harapkan? Dapat diketahui dari Diagram diatas yang menyatakan Jawaban Ya pada warna biru dengan persentase 48,35 atau 48%. Sedangkan Jawaban Tidak pada warna merah dengan persentase 51,64 atau 52%

Jadi dapat disimpulkan dari diagram diatas berdasarkan dari Indikator dampak bahwasanya Pelaksanaan PKH di Kecamatan Lingga Bayu sudah terlaksana dengan baik atau dikatakan sudah efektif pada butir pertanyaan 4.a., 4.b, 4.c,4.d Dikarenakan capaian hasil yang diteliti 100%. Pada peserta PKH menyatakan PKH ini belum sesuai harapan dikarenakan ketidaktepatan waktu dalam pencairan dana, ketidaktepatan sasaran dalam menentukan peserta masih banyak ditemukan Peserta PKH yang tidak layak mendapat bantuan. ini merupakan tidak efektif dikarenakan capaian hasil dibawah 50%

## **B. Pembahasan**

### **1. Hasil Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.**

- a. Indikator Masukan (Tersedianya Pedoman Umum, persiapan Sosialisasi).Berdasarkan dari data sekunder yang telah dapat oleh penulis dilapangan diketahui bahwa tingkat kebutuhan rata-rata sebagian masyarakat Kecamatan Lingga Bayu adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

No	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (Per/bulan)
1.	Kebutuhan Pangan/Makanan	Rp. 700.000
2.	Kebutuhan Sandang Pakaian	Rp.300.000
3.	Biaya Pendidikan	Rp.500.000
4.	Biaya Kesehatan	Rp.200.000
5	Pengeluaran Lain (Listrik dll)	Rp.100.000

*Sumber Data: Hasil wawancara Staf Sekretaris Desa<sup>63</sup>*

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pangan Rp.700.000,pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 200.000 tidak sebanding dengan tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan pendapatan rata-rata perbulan yang hanya mencapai Rp.500.000-Rp800.000.<sup>64</sup>Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kecamatan Lingga Bayu adalah masyarakat miskin, dimana jumlah pendapatan yang mereka miliki tidak dapat mencukupi tingkat kebutuhan ekonomi mereka.Sedangkan yang disebut keluarga miskin menurut BPS adalah sebagai berikut:

Sedangkan indikator kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- a) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti lahan, modal, peralatan kerja, dan keterampilan memadai
- b) Tingkat pendidikan yang rendah
- c) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- d) Berada dikawasan pedesaan atau kawasan yang jauh dari pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan
- e) Memiliki kesempatan yang relative rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya

Jika variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga kondisi miskin atau tidak sejahtera. Berdasarkan tolak ukur diatas yang dimaksud

---

<sup>63</sup>Wawancara ibu Anisyah, Sekretaris Desa Parbatasan, Pada (23 Mei 2019 Pukul 10:30 WIB).

<sup>64</sup>Berdasarkan hasil penelitian mayoritas masyarakat Desa Kecamatan Lingga Bayu berpenghasilan antara.Rp500.000 dan kurang dari Rp.800.000.

keluarga miskin menurut BPS, di Kecamatan Lingga Bayu ditemukan peserta PKH yang tidak termasuk dalam keluarga miskin.

**Tabel 4.9**

No	Nama Peserta	Kriteria Keluarga Sejahtera Terpenuhi
1.	Tinurmala	Rumah sendiri, luas bangunan lebih dari 8m <sup>2</sup> , lantai rumah semen, dinding beton, tersedia fasilitas MCK, sumber penerangan menggunakan listrik, memiliki kebun dan kendaraan bermotor
2.	Asmia Giawa	Rumah sendiri, luas bangunan lebih dari 8m <sup>2</sup> , lantai rumah semen, dinding beton, tersedia fasilitas MCK, sumber penerangan menggunakan listrik, memiliki kebun dan kendaraan bermotor, memiliki usaha warung
3.	Siti Napsiah	Rumah sendiri, luas bangunan lebih dari 8m <sup>2</sup> , lantai rumah Keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, memiliki asset tetap(kebun) dan 2 kendaraan bermotor
4.	Fadilah Dly	Rumah sendiri, luas bangunan lebih dari 8m <sup>2</sup> , lantai rumah semen, dinding beton, tersedia fasilitas MCK, sumber penerangan menggunakan listrik, memiliki asset tetap (kebun) dan kendaraan bermotor
5.	Midayana	Rumah sendiri, luas bangunan lebih dari 8m <sup>2</sup> , lantai rumah semen, dinding beton, tersedia fasilitas MCK, sumber penerangan menggunakan listrik, memiliki asset tetap (kebun) dan kendaraan bermotor
6	Megawati	Rumah sendiri, luas bangunan lebih dari 8m <sup>2</sup> , lantai rumah semen, dinding beton, tersedia fasilitas MCK, sumber penerangan menggunakan listrik, memiliki asset tetap (kebun) dan kendaraan bermotor
7	Nursayani	Rumah sendiri, luas bangunan lebih dari 8m <sup>2</sup> , lantai



	Hutabarat	rumah semen, dinding beton, tersedia fasilitas MCK, sumber penerangan menggunakan listrik, memiliki asset tetap (kebun) dan kendaraan bermotor.
8	Nur Hidayah	Rumah sendiri, luas bangunan lebih dari 8m <sup>2</sup> , lantai rumah Keramik, dinding permanen, tersedia fasilitas MCK, sumber penerangan menggunakan listrik, memasak dengan kompor gas, memiliki asset tetap (kebun) dan kendaraan bermotor

*Sumber: Data diolah berdasarkan Data dari Operator PKH Mandailing Natal*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 8 (delapan) peserta PKH tersebut sudah dapat dikatakan dalam keluarga sejahtera yang seharusnya tidak lagi mendapat bantuan PKH. Karena pada dasarnya kebutuhan dasar, kesehatan serta pendidikan sudah mampu terpenuhi sendiri. Tidak efektifnya penetapan RTM penerima bantuan ini dakerenakan data yang digunakan untuk penetapan penerima bantuan ditentukan dengan data ditingkat nasional dengan menggunakan data pada tahun sebelumnya/data yang digunakan tidak valid, sedangkan ketika ada peralihan status pada RTM di daerah harus melalui proses panjang agar bisa digantikan atau dihapus dari daftar penerima bantuan.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan pedoman umum PKH serta menjadikan penetapan RTM penerima bantuan kurang tepat sasaran. Melihat dari kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan peserta PKH di Di belum tepat sasaran, selain adanya peserta yang beralih status menjadi keluarga sejahtera ditemukan pula peserta yang berasal dari keluarga sejahtera (mampu). Namun sebaliknya yang seharusnya mendapat bantuan PKH justru tidak mendapat.

- 1) Indikator Proses (Tindak lanjut dari penetapan RTM yaitu verifikasi data, dan pelaksanaan sosialisasi).

Verifikasi data dilakukan dengan cara RTM menunjukkan kartu anggota serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan seperti (KTP, KK, ASKES, absensi kehadiran siswa dan lain-lain). Berdasarkan hasil jawaban kuesioner, 91 responden mengatakan bahwa verifikasi data dengan syarat mengumpulkan sejumlah data-

data ini tidak memberatkan peserta Penerima PKH.<sup>65</sup> Sehingga dapat berjalan dengan efektif. Setelah dilakukannya verifikasi data maka tahap lanjut adalah sosialisasi dimana verifikasi data dan sosialisasi dilakukan pada hari yang sama. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang tujuan, hak dan kewajiban, sanksi, pengaduan dan lain sebagainya serta mulai dilakukannya pendampingan oleh petugas kepada anggota PKH.

Dari hasil kuesioner yang di dapat bahwa dari 91 responden hanya 48 responden yang menjawab mengerti dan memahami tujuan, hak dan kewajiban pada PKH dan 43 lainnya tidak memahami. Dari hasil penelitian dilapangan ditemukan keterangan bahwa responden yang tidak memahami pada saat pelaksanaan sosialisasi PKH secara keseluruhan dikarenakan latar belakang pendidikan responden yang sebagian adalah tidak tamat Sekolah Dasar (SD), serta faktor usia yang sudah tidak muda lagi sehingga responden ini kurang tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh pendamping PKH. sehingga responden ini kurang pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh pendamping PKH.<sup>66</sup>

Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tidak tamat SD sebanyak 16 peserta
- b) Lansia sebanyak 4 peserta

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang efektif.

Setelah sosialisasi RTM mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai peserta serta mulai dilakukannya penyaluran dana kepada peserta PKH).

- 2) Indikator Manfaat (Pencairan dana tepat waktu dan Dana yang diterima diperuntukkan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan).

Pada tahap penyaluran dana dibutuhkan ketepatan waktu dan ketepatan jumlah. Berdasarkan hasil kuesioner pada 91 respondenpeserta PKH menjawab “iya” untuk ketepatan waktu berjumlah 42 peserta dan 100% responden menjawab

---

<sup>65</sup>Ema, Rosrika dan Rosmawati, peserta PKH, Wawancara Pribadi 23 Mei 2019

<sup>66</sup>Berikut ini peserta yang tidak tamat SD (Eli Mariana, Saliah, Loma Sari, Sampe Roilah, Sapiana, Risna, Asnelli, erni, Mesrah, Yanni, Nurbayani, Linda, Rosmala Lubis, Maryam, Netti, Elpi) dan Peserta PKH Lansia, (Bahraini, Kasrina, Kadilen, Aslamiah).

“iya” ketepatan jumlah pada tahap penyaluran dana. Tahap penyalurannya pun dilakukan sesuai dengan pedoman umum. Terdapat pemotongan dana oleh pihak-pihak tertentu sehingga proses penyaluran dana PKH di Kecamatan Lingga Bayu tidak dilakukan dengan efektif.

Berdasarkan hasil kuesioner pada 91 responden dilapangan menunjukkan 55 responden atau 60% responden menyatakan bahwa dana PKH yang mereka terima selain digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan dana PKH juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (biaya hidup sehari-hari).

Berdasarkan hasil wawancara hal ini dikarenakan pendapatan RTM yang sangat rendah sehingga para RTM kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan harus memanfaatkan dana PKH membantu memenuhi kebutuhan selain pendidikan dan kesehatan. 55 responden ini menyatakan bahwa mereka terpaksa menggunakan sebagian dana PKH untuk kebutuhan lainnya karena minimnya pendapatan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Dan juga

Berdasarkan hasil kuesioner dilapangan menunjukkan bahwa 48 peserta PKH menyatakan bahwa kualitas pendidikan dan kesehatan masih dalam tarap mencukupi setelah mereka terdaftar sebagai peserta PKH (banyak penyalahgunaan dana PKH oleh peserta PKH). Hal ini dibenarkan oleh pendamping PKH di Kecamatan Lingga Bayu, beliau mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PKH hampir seluruh anak yang dalam masa pendidikan dan mendapat bantuan PKH mereka memenuhi kewajiban mereka yakni mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari belajar aktif. Selain itu tingkat kehadiran ibu hamil dan balita dalam memerikasakan kesehatannya juga meningkat. PKH sangat membantu kesulitan masyarakat terutama di Kecamatan Lingga Bayu. Dengan demikian hal ini dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana PKH oleh peserta kurang tepat sehingga manfaatnya terhadap pendidikan dan kesehatan kurang efektif.

### 3) Indikator Dampak (mensejahterakan dan menanggulangi miskin)

Dari 91 responden dalam penelitiandilapanganmenyatakan 100% mensejahterakan keluarga miskin dan juga para peserta PKH 100% responden

ingin agar PKH tetap dilanjutkan karena program ini sangat membantu masyarakat dalam membantu menanggulangi keluarga miskin terkhususnya, mengantarkan anak-anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mampu membantu mencukupi kebutuhankesehatan bagi ibu hamil dan balita. Walaupun bagi sebagian peserta dana PKH yang mereka terima masih sangat minim sehingga mereka harus tetap bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan indikator diatas bahwasanya pelaksanaan PKH di Kecamatan Lingga Bayu dapat diartikan belum terlaksana dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dari indikator efektifitas PKH hanya dua indikator saja yang mampu terpenuhi dengan baik yaitu pada indikator proses dan dampak. Sedangkan indikator masukan dan keluaran dan manfaat masih belum efektif.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu melalui PKH belum efektif, pernyataan ini juga didukung oleh meningkatnya jumlah penerima PKH yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9**  
**PENERIMA PKH DI KECAMATAN LINGGA BAYU**  
**TAHUN 2016 s/d 2017**

NAMA DESA	TAHUN 2016	TAHUN 2017
AEK GARINGGING	1	27
AEK MANYURUK	2	8
BANDAR LIMABUNG	5	9
BONCA BAYUON	1	16
DALAN LIDANG	4	9
KAMPUNG BARU	8	65
LANCAT	5	31
LOBUNG	1	24
PANGKALAN	11	43

PARBATASAN	4	41
PERK. SIMPANG GAMBIR	1	6
SIKUMBU	2	17
SIMPANG BAJOLE	8	23
SIMPANG DUKU	3	29
SIMPANG DURIAN	32	150
SIMPANG GAMBIR	8	91
SIMPANG KOJE	31	40
TANGSI ATAS	1	1
TAPUS	6	54

*Sumber Data: Diperoleh dari Operator PKH Mandailing Natal*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa penerima PKH mengalami peningkatan, jika pada 2016 hanya 134peserta PKH ada penambahan anggota sebanyak 684 orang dengan jumlah keseluruhan adalah 848 peserta, penambahan peserta tersebut tidak disertai pengurangan anggota yang sudah dikatakan sejahtera. artinya PKH selama 5 tahun berjalan baru mampu meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan peserta. Selama 5 tahun berjalan belum mampu mengcover seluruh keluarga miskin yang ada di Kecamatan Lingga Bayu. Terlebih lagi dana PKH yang alokasinya hanya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan bukan digunakan untuk modal usaha, sehingga PKH hanya mampu mengurangi beban pendidikan dan kesehatan RTM. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan membutuhkan modal/lapangan pekerjaan untuk dapat meningkatkan pendapatan.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa PKH belum mampu menekan/penanggulangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pada Kecamatan Lingga Bayu melalui PKHmemberikan manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat tetapi seiring berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lingga Bayu belum mampu memutus mata rantai kemiskinan yang ada dimasyarakat. Hanya saja PKH memberi sisi positif pada meningkatnya kualitas pendidikan dan

kesehatan. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menekan tingginya tingkat kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu.

## **2. Analisis Hambatan dalam Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu**

Dalam pelaksanaan suatu program tentu tidak menutup kemungkinan timbul suatu hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan. Hambatan tersebut muncul saat program telah dilaksanakan, yang biasa dirasakan baik dari petugas maupun masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan hambatan-hambatan dalam mengefektivkan Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lingga Bayu maka diperoleh beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping dan peserta PKH, yaitu:

- a. Banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH
- b. Belum adanya kesadaran dari peserta, dan
- c. Pencairan bantuan yang sering tidak tepat waktu.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program menanggulangi keluarga miskin dengan memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberikan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana yang dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga (RTSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan aspek teori Sondang P. Siagian mengatakan bahwasanya efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalakannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>67</sup>

Kesesuaian antara teori dengan praktek terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang Penyaluran dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu jika dilihat dari proses pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: Penetapan Rumah Tangga Sasaran, Proses Sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok keluarga penerima manfaat (KPM), pelaksanaan pemutakhiran data KPM, Pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi fasilitas pendidikan (fasdik) dan fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial.

Meskipun pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan oleh para pendamping dimasing-masing Desa di Kecamatan Lingga Bayu sendiri khususnya pada saat sosialisasi mengenai program tersebut berbarengan dengan pelaksanaan pertemuan awal dan validasi hal tersebut dirasa sangat kurang efektif untuk pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan meskipun demikian pelaksanaan pertemuan kelompok di Kecamatan Lingga Bayu rutin diadakan.

Komitmen peserta Program Keluarga harapan dalam memanfaatkan komponen bantuan yang diperoleh seperti komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan kesejahteraan sosial beberapa dari peserta yang diwawancarai oleh penulis terhadap kehadiran peserta difasilitas pendidikan karena para peserta mengetahui resiko ataupun sanksi yang diperoleh jika anak-anak mereka kehadiran disekolah kurang dari 85% bantuan akan dipotong ataupun dipending pada komitmen peserta difasilitas pendidikan. Sedangkan pada komitmen peserta difasilitas pendidikan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada waktu-waktu tertentu wajib mengunjungi posyandu atau fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Lingga Bayu.

---

<sup>67</sup>Siagian, P. Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015, h.158.

Di Kecamatan Lingga Bayu untuk menerima bantuan pada komponen penyandang disabilitas dan lansia 70 tahun keatas yang masuk dalam kategori tersebut. Dari informasi dilapangan masih ada bantuan yang belum tersalurkan.

Dapat dikatakan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lingga Bayu belum efektif karena melihat dari jumlah peserta Program Keluarga Harapan yang berjumlah 91 masih belum puas terhadap fasilitas yang diberikan kepada peserta seperti fasilitas pendidikan Program Keluarga Harapan yang mempunyai anak usia sekolah lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA dan sasaran penerimaan bantuan PKH yang tidak merata untuk masyarakat di Kecamatan Lingga Bayu.

Dalam penyaluran Program Keluarga Harapan tentu tidak menutup kemungkinan timbul suatu hambatan yang dihadapi dilapangan hambatan tersebut dapat muncul saat PKH dilaksanakan, baik dirasakan oleh pendamping PKH dan masyarakat penerima PKH.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dari penilitiserta uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Efektivitas PenyaluranProgram Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kecamatan Lingga Bayu sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu yang dimulai sejak tahun 2014 sampai sekarang ini yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah di Kecamatan Lingga Bayu kurang terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan/penetapan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH menjadi tidak sesuai dengan tujuan program PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi/menanggulangi kemiskinan yang ada Khususnya di Kecamatan Lingga Bayu.
2. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lingga Bayu maka terlihat bahwa ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping dan peserta PKH antara lain: banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH, belum adanya kesadaran dari peserta, dan pencairan bantuan PKH yang sering tidak tepat waktu.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepala Jaminan Sosial dibidang sosial Program Keluarga Harapan agar program ini perlu di evaluasi dan di monitoring lebih baik lagi, melakukan sosialisasi baik secara nasional khususnya di

daerah pedalaman secara terarah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai program ini kepada semua pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur secara tegas terarah dan sesuai dengan pedoman umum. Dan dalam penentuan RTM penerima bantuan diharapkan menggunakan data yang valid agar lebih tepat sasaran.

2. Disarankan kepada Petugas PKH/pendamping PKH harus lebih mengarahkan kepada kedepannya agar lebih memfokuskan pada proses penyadaran RTM agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pemerintah.
3. Disarankan kepada penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah di terapkan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnicun Azis dan Hartomo. *Ilmu Sosial Dasar*: Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*: Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arsyad Lincollin dan Soeratno. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Lima: Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.
- Astuti Elvira. "Efektifitas Program Beras Sejahtera (Rastra) Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan", 2018.
- Bapeda. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal*.
- Badith Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang: UIN Maliki Pres, 2012.
- Bantuan Sosial Terintegrasi*: Cetakan Kedua, November 2018.
- BPS MADINA. *kecamatan Lingga Bayu dalam Angka 2018*: Panyabungan: CV. Rilis Grafika, 2018.
- Crisdawani Suryawati. Jurnal: Memahami Kemiskinan secara Multimendisional pada 15 Mei 2019 Pukul 11.00.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*: Jakarta: Kencana, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia: Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djamurti Hanafie, Sri Rahaju Rita. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*: Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Hidayat Wanda Moch Ryan. "Efektifitas Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Penerima Manfaat di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember", 2018
- Huda Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.

- Kasim Muslim. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus di Padang Mariaman*. Jakarta: Indonesia, 2006.
- Laily Dwi Arsyianti dan Irfan Syauki Beik. *Ekonomi Pembangunan Syariah: Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- L Lexy Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung, Rosda, 2006
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja sektor public*: Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Maimun Sholeh. *Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Sosio Konsepsia
- Marliyah, Yani Abdillah, Isnaini Harahap. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*: Medan: Febi Uinsu Fress, 2015.
- Muhajir Darwin. *Memanusiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*: Yogyakarta: Benang Merah, 2005.
- Nasikun Chambers. *Isu Dan Kebijakan Penanggulangan*: Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2001.
- Nurul Huda, Qardhawi, dan dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*: Jakarta: Kencana, 2015.
- Noer Rianto, Al arif. *Teori Ekonomi Makro Islam*: Bandung: Alfabeta, 2010.
- Onlinewebsite: [staff.uny.ac.id/Kemiskinan%20%20Telaah%20Dan%20Berapa%20Strategi%20Pediakses](http://staff.uny.ac.id/Kemiskinan%20%20Telaah%20Dan%20Berapa%20Strategi%20Pediakses) pada 18/12/2018. Pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 10.30 Wib.
- Pasolong Harbani. *Teori Administrasi Publik*: Bandung: Alfabeta, 2007.
- Pane Astuti, Elvira “Efektifitas Program Beras Sejahtera (Rastra) Untuk Masyarakat Miskin Di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan,” 2018
- Pengolaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2017*.
- Pedoman Umum Bantuan Non Pangan*, 2018.
- Pengetahuan dan Kebijakan Pkh*, 2018.

*Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu, Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi: Jakarta: Cetakan Kedua, November 2018.*

Rahmad. Operator PKH Dinas Sosial Panyabungan, wawancara pribadi, parbatasan, 15 Maret 2019, Pukul 10.30 Wib.

Ridho Diana. “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perpektif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Kota Gowa Kecamatan Way Kanan*” Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Rita Hanafi, Sri Rahaju Djatimurti. *Ilmu Sosial Budaya Dasar: Yogyakarta: Andi Ofiset, 2016.*

Sahib Munawwarah. “*Pengaruh Kebijakan PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*” Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2016.

Sinaga Tirtado, “*Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Selayang.*” Skripsi, USU, Medan, 2018

Sudiarti Sri, M .Ridwan, Shafwan Ismail. *Peranan Dompot Duafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan: Jurnal KITABAH, Volume 2. No 2 Juli-Desember 2018.*

Syarif Makmur. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi/Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Kencana, 2008.*

Sinaga Tirtado. “*Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Selayang*”, 2018.

Sugiono. *Metode penelitian Bisnis: Bandung: Alfabeta, 2012.*

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi: Bandung: Alfabeta, 2013.*

Sondang P Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.*

Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*: Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

Sunarto Hapsoyo dan Sulkan Yasin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis: Populer dan Kosa Kata baru*: Surabaya: Mekar, 2008.

TP2NK, *Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*: Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017.

[www.Kemensospkh.go.id](http://www.Kemensospkh.go.id) 2017.12 April 2019, Pukul 10.35.

Wanda Hidayat Ryan Moch. "*Efektifitas Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Penerima Manfaat di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*". Skripsi, 2018.





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas diri**

Nama : Siti Paisah  
Nim : 51153102  
Tempat, Tanggal Lahir : Perbatasan, 24 November 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Perbatasan, Kec. Lingga Bayu,  
Kab. Mandailing Natal

### **Pendidikan**

SDN. No. 299 Perbatasan : 2003 - 2008  
MTs Tarbiyah Islamiyah Tapus : 2008 - 2011  
Mas Tarbiyah Tapus : 2011 - 2014  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2015 - 2019